

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PADA BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO

**OLEH
NATASYA FABRILLA HIKAYA
NIM: E.11.17.058**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
PADA BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO**

**OLEH
NATASYA FABRILLA HIKAYA
NIM: E.11.17.058**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo

Pembimbing I



Revther Biki, SE., M. Si
NIDN : 09 270770 01

Pembimbing II



Rusdi Abdul Karim, SE, M.Ak
NIDN : 09 020864 02

HALAMAN PERSETUJUAN

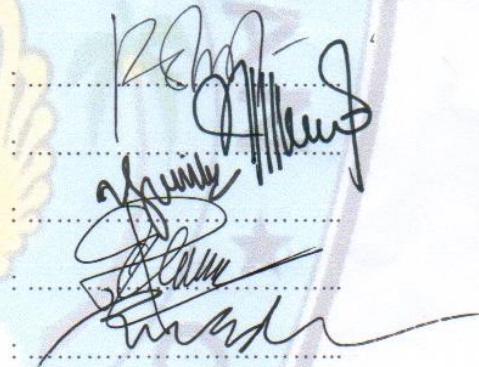
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PADA BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO

Oleh
NATASYA FABRILA HIKAYA
E11.17.058

Telah Memenuhi syarat dan Dipertahankan pada komisi Ujian Akhir
Hari/Tanggal : Kamis, 08 April 2021

Komisi Penguji :

1. Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si
2. Melinda Ibrahim, SE., MSA
3. Rizka Yunika Ramly, SE, M.Ak
4. Reyther Biki, SE., M.Si
5. Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak



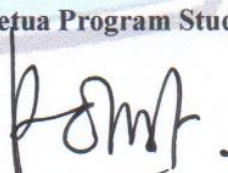
Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. ARIAWAN, S.Psi., SE., MM
NIDN 0922057502

Ketua Program Studi Akuntansi



RAHMA RIZAL, SE., Ak., M.Si
NIDN 0914027902

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Natasya Fabrilla Hikaya

Nim : E1117058

Program Studi : Akuntansi

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 5 Maret 2021

Yang membuat pernyataan




Natasya Fabrilla Hikaya

MOTTO dan Persembahan

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” (QS 94:6-7)

“Ketika kumohon kepada Allah SWT kekuatan, Allah SWT kekuatan, Allah SWT memberiku kesulitan agar aku menjadi kuat.

Ketika kumohon kepada Allah SWT kebijaksanaan, Allah SWT memberiku masalah untuk kupecahkan.

Ketika kumohon kepada Allah SWT kesejahteraan Allah SWT memberiku akal untuk berpikir.

Ketika kumohon kepada Allah SWT keberanian, Allah SWT memberiku kondisi bahaya untuk kuatasi.

Ketika kumohon kepada Allah SWT bantuan, Allah SWT memberiku kesempatan untuk keberhasilanku.”

Aku persembahkan Skripsi ini untuk ibuku “Yurike Abukasi” dan Ayahku “Raflen Hikaya”, Kakakku “Bripda Febrianda pricelia Hikaya S.E “, Ikbal Maulana Hikaya”. Terima kasih atas segala cinta perjuangan, nasehat dan doa yang telah kalian berikan dalam perjuangan ini mama,papa kakaku.

Terima kasih kepada dosen-dosen terutama pembimbing terbaik yang selalu saja memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar selama perjuangan skripsi ini.

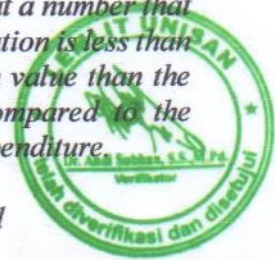
Terima kasih juga Kepada Teman-teman Akuntansi Reg A angkatan 2017 yang berjuang bersama dan saling mendukung satu sama lain untuk keberhasilan skripsi ini semoga keakraban kita tidak hanya sampai di sini.

ABSTRACT

NATASYA FABRILLA HIKAYA. E1117058. THE ANALYSIS OF THE LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE AT THE GORONTALO CITY FINANCIAL BOARD

This study aims to determine the financial performance from the revenue and expenditure ratios. The method uses a quantitative approach with a descriptive analysis. The results of the study show that the development of financial performance at Gorontalo City Financial Board viewed from the aspect of revenue is classified as poor and less optimized. The variance of revenue is too high that the trend of revenue receipt has not been optimal. The revenue growth ratio and the effectiveness ratio of local own-source revenue (PAD) are fluctuated in which the ratio value remains low and has decreased in recent years. As for expenditure, the financial performance of the Gorontalo City Financial Board remains in a good condition. Some of the ratios show that spending activities remain at a number that does not exceed the budgeted funds. The ratio of expenditure realization is less than 100%. However, the portion of operating expenditure is larger in value than the portion of capital expenditure. The value is not reasonable compared to the standard of ideal portion either for the operating or the capital expenditure.

Keywords: financial performance, Gorontalo City Financial Board



ABSTRAK

NATASYA FABRILLA HIKAYA. E1117058. ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PADA BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan ditinjau dari rasio pendapatan dan rasio belanja. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kinerja keuangan pada Badan Keuangan Kota Gorontalo jika ditinjau dari aspek pendapatan masih tergolong kurang baik dan belum optimal, dimana nilai varians pendapatan masih terlalu besar sehingga kecenderungan penerimaan pendapatan belum optimal. Nilai rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio efektivitas PAD yang fluktuatif dengan nilai rasio yang masih rendah dan mengalami penurunan ditahun-tahun terakhir. Sedangkan kinerja keuangan pada Badan Keuangan Kota Gorontalo jika ditinjau dari aspek belanja masih dalam kondisi yang baik, beberapa rasio menunjukkan kegiatan belanja masih tergolong pada angka yang tidak melebihi dari dana yang dianggarkan atau rasio realisasi belanja masih kurang dari 100%. Namun demikian, porsi belanja operasi masih lebih besar nilainya jika dibandingkan dengan porsi belanja modal dengan nilai porsi yang tidak wajar jika dibandingkan dengan standar porsi yang ideal, baik belanja operasi maupun belanja modal.

Kata kunci: kinerja keuangan, Badan Keuangan Kota Gorontalo



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatulahi wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Atas segala rahmat yang di berikan sehingga saya dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini dengan judul: “Analisis kinerja keuangan Pemerintah Ditinjau dari laporan Realisasi anggaran pada kantor keuangan Kota Gorontalo”.

Dalam penyusunan Skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun berkat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT, juga mendapatkan bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dari berbagai pihak, maka semua hambatan dan rintangan tersebut dapat di atasi. Terdapat kekurangan, kesalahan dan kekeliruan dalam penyusunan Skripsi ini. Oleh sebab itu penulis mengharapkan koreksi dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan penulisan tersebut. Oleh sebab itu ucapan terima kasih kepada Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., CA., selaku ketua yayasan PIPT Ichsan Gorontalo, Bapak Abdul Gaffar La Tjooke M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Reyther Biki SE., M.si selaku Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo dan selaku Pembimbing I. Bapak Ariawan SE., S.Psi, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo Ucapan terima kasih kepada Ibu Rahma Rizal SE. Ak, M.Si Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Rusdi Abdul Karim SE., M.Ak selaku Pembimbing II yang telah memberikan dorongan, bimbingan sehingga Skripsi ini dapat selesai, ucapan terima kasih juga terutama Kepada kedua Orang Tua, Mama

Yurike Abukasi dan Papa Raflen Hikaya yang telah banyak memberikan segalanya kakaku yang pertama Febrianda hikaya yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi, dan kaka ke 2 Ikbal Maulana Hikaya, Oma, opa yang selalu memberikan support, Orang tersayang, dan sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat Iren yang selalu banyak membantu, kesya,Munifa,widi,ega, dan juga sahabat semasa kecil anggy,itun,inda dan termasuk ela yang sudah banyak membantu. Dosen dan staf Universitas Ichsan Gorontalo dan Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa Akuntansi yang tak bisa di sebutkan satu per satu yang telah menemani selama 3 tahun di universitas ichsan gorontalo.

Semoga Skripsi ini dapat di terima dan bermanfaat. Amin Allahuma Amin.

Gorontalo,.....2021

Penulis

Natasya Fabrilla Hikaya
NIM: E1117058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Maksud Penelitian.....	7
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktisi.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Kajian Pustaka.....	8
2.1.1 Definisi Kinerja.....	8
2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	8
2.1.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah.....	9
2.1.4 Informasi Mengukur Kinerja Keuangan	10
2.1.5 Laporan keuangan Pemerintah Daerah	10
2.1.6 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	14
2.1.7 Teknik Analisis Laporan Keuangan.....	15
2.1.8 Analisis Pendapatan	16
2.1.9 Analisis Belanja	18

2.1.10 Penelitian Terdahulu	22
2.2 Kerangka Pemikiran	23
BAB III. METODE DAN OBJEK PENELITIAN	25
3.1 Objek Penelitian	25
3.2 Metode Penelitian.....	25
3.2.1 Metode Penelitian Yang Digunakan	25
3.2.2 Oprasional Variabel	25
3.3 Jenis dan Sumber Data	27
3.3.1 Jenis Data	27
3.3.2 Sumber Data.....	27
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Hasil Penelitian	31
4.2 Pembahasan.....	48
BAB V. KESIMPULAN.....	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:	Ikhtihar Laporan Realisasi Anggaran.....	5
Tabel 2.1	:	Kriteria Efektivitas PAD	18
Tabel 2.2	:	Rasio Efisiensi Belanja.....	21
Tabel 2.3	:	Kriteria Analisis Laporan Kinerja	21
Tabel 2.4	:	Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1	:	Operasionalisasi Variabel.....	26
Tabel 4.1	:	Varians Pendapatan 2016	34
Tabel 4.2	:	Varians Pendapatan 2017.....	34
Tabel 4.3	:	Varians Pendapatan 2018.....	34
Tabel 4.4	:	Varians Pendapatan 2019.....	35
Tabel 4.5	:	Pertumbuhan Pendapatan Pajak daerah.....	36
Tabel 4.6	:	Pertumbuhan Pendapatan Retribusi Daerah.....	36
Tabel 4.7	:	Pertumbuhan Pendapatan Hasil Yang Dipisahkan.....	37
Tabel 4.8	:	Pertumbuhan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah	37
Tabel 4.9	:	Efektivitas PAD Pajak daerah.....	38
Tabel 4.10	:	Efektivitas PAD Retribusi Daerah	38
Tabel 4.11	:	Efektivitas PAD Hasil Yang Dipisahkan	39
Tabel 4.12	:	Efektivitas PAD Lain-Lain Yang Sah.....	39
Tabel 4.13	:	Varians Belanja 2016.....	40
Tabel 4.14	:	Varians Belanja 2017.....	41

Tabel 4.15	:	Varians Belanja 2018.....	41
Tabel 4.16	:	Varians Belanja 2019.....	41
Tabel 4.17	:	Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung	43
Tabel 4.18	:	Pertumbuhan Belanja langsung.....	43
Tabel 4.19	:	Rasio Belanja Operasi	44
Tabel 4.20	:	Rasio Belanja Modal	46
Tabel 4.21	:	Rasio Efisien Belanja	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	:	Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar 4.1	:	Struktur Ornganisasi.....	33
Gambar 4.2	:	Grafik Varians Pendapatan	35
Gambar 4.3	:	Garfik Pertumbuhan Pendapatan.....	37
Gambar 4.4	:	Garfik Efektivitas PAD	39
Gambar 4.5	:	Garfik Varians Belanja.....	42
Gambar 4.6	:	Garfik Pertumbuhan Belanja.....	43
Gambar 4.7	:	Garfik Belanja Operasi.....	45
Gambar 4.8	:	Garfik Belanja Modal.....	46
Gambar 4.9	:	Garfik Efisiensi Belanja	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Daftar Pernyataan	48
Lampiran Dokumentasi Penelitian.....	49
Lampiran Surat Izin Penelitian	50
Lampiran Surat Keterangan Lokasi Penelitian	50
Lampiran Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi	51
Lampiran Hasil Turnitin.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu pemerintahan daerah yang mampu mengelola keuangan daerahnya dengan baik, dengan melaksanakan otonomi daerah dengan baik karena ciri utama daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu kemampuan keuangan daerah dan ketergantungan ke pihak pusat harus diminimalkan, namun pada kenyataannya, sudah belasan tahun sejak otonomi daerah di berlakukan kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada pihak pusat. Oleh karena itu untuk melihat kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya maka perlu pengukuran Kinerja Keuangan (Hakim,2018).

Hal ini dikarenakan telah terjadi desentralisasi sehingga memberikan kemudahan kontrol dibandingkan dengan sentralisasi, setelah di berlakunya undang-undang tersebut maka pemerintah daerah telah diberikan tanggung jawab yang mengharuskan Pemerintah Daerah Lebih berperan aktif dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan yang merupakan konsekuensi dari otonomi daerah (Dora, 2017).

Perubahan sistem pemerintahan membawa perubahan pada sistem hubungan keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 memiliki hubungan yang berkaitan karena dengan adanya Peralihan Wewenang pemerintah pusat ke daerah maka harus diikuti dengan penyerahan keuangan yang

di percayakan Pemerintah Pusat untuk mengolah keuangan daerahnya (Rahayu,2016).

Menurut (Mahmudi 2010), dapat di lakukan dengan menggunakan analisis pendapatan ,analisis belanja dan analisis pembiayaan. Analisis pendapatan bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemandirian pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi pendapatan yang diterimanya.Dengan tingkat kemandirian keuangan yang besar berarti daerah tidak lagi tergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah pusat. Analisis belanja dimaksudkan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis,efisien dan efektif. Sedangkan analisis pembiayaan dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran yang telah dikelola.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Keuangan Kota Gorontalo dengan menggunakan laporan Realisasin Anggaran (LRA) yang dipublikasikan. Jika dibandingkan dengan neraca, LRA menduduki prioritas lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca, laporan oprasional serta laporan arus kas.Sedangkan anggaran dalam pemerintah merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

Pengukuran kinerja keuangan daerah sangat penting untuk menilai transparasi dan akuntabilitas laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah karena pada laporan tersebut menyediakan informasi dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan

diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah (Assidiqi,2014).

(Mardiasmo 2007) menyatakan bahwa pengukuran kinerja untuk memenuhi tiga maksud pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Parker (1996) dalam suradjito (2000) menyebutkan terdapat lima manfaat dengan adanya pengukuran kinerja yaitu : (1) pengukuran kinerja mampu meningkatkan mutu pengambilan keputusan: (2) pengukuran kinerja mampu meningkatkan akuntabilitas internal : (3) pengukuran kinerja mampu meningkatkan akuntabilitas public : (4) pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan : (5) pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif.

Dengan adanya pengukuran, analisis, dan evaluasi terhadap data yang berkaitan dengan kinerja, pemerintah dapat segera menentukan berbagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dan sekaligus memberikan informasi obyektif kepada publik mengenai pencapaian hasil yang diperoleh.

Laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau instansi karena fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan atau instansi. Laporan realisasi anggaran adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi yaitu, aktivitas pengumpulan dan pengelolaan

data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan

Untuk Pengelolaan Keuangan daerah dibutuhkan sumber daya ekonomi berupa keuangan yang di tuangkan dalam satu anggaran. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Suatu pemerintahan daerah yang mampu mengelola keuangan daerah dengan baik maka telah melaksanakan otonomi daerah karena ciri utama daerah yang mampu melaksanakan otonomi yaitu, kemampuan keuangan daerah dan ketergantungan ke pihak pusat harus di minimalkan. Namun kenyataannya sudah belasan tahun sejak otonomi daerah diberlakukan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah masih sangat tergantung dari pihak pusat. Oleh karena itu untuk melihat kemampuan daerah dalam mengelola keuangan maka perlu pengukuran kinerja keuangan. (Hakim.2018).

Pemerintahan daerah pada sektor swasta anggaran merupakan rahasia dari perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor pemerintahan atau publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan. Dalam penyusunan APBD diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

(Menurut Bastian 2005) prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan bertanggung jawab nyata pada pemerintah daerah secara

proporsional dalam mengelola anggaran. Realisasi anggaran mengacu pada beberapa variabel dalam penggunaannya, diantaranya jumlah anggaran yang tersedia, penggunaan anggaran, dan sisa anggaran yang merupakan keuangan daerah yang harus ditelusuri dalam penggunaannya. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Pemerintah daerah menetapkan partisipasi setiap satuan kerja dalam penyusunan anggaran masing-masing SKPD membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang biasa disebut RKA SKPD. Dalam RKA SKPD masing-masing SKPD telah membuat indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam RKA telah memuat input, output dan outcome dari masing-masing program dan kegiatan jadi dalam RKA telah memuat sasaran anggaran.

Tabel 1.1
Ikhtisar Laporan Realisasi Anggaran Untuk Pos Pendapatan dan Belanja Badan
Keuangan Kota Gorontalo Tahun 2017 s/d Tahun 2019

URAIAN	ANGGARAN			REALISASI		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
PAD	67.053.945.507	76.691.561.214	83.537.542.689	65.176.593.708	67.102.488.100	74.857.417.467
Belanja	88.542.695.431	82.922.530.702	122.817.777.427	80.479.659.173	78.212.311.751	99.030.153.123
Belanja Operasi	72.511.373.0233	40.336.738.595	105.385.126.927	66.995.479.307	39.695.230.105	82.992.812.501
Belanja Modal	3.464.872.408	1.596.175.000	1.901.325.000	1.435.461.866	1.464.807.820	1.634.472.790

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Badan Keuangan Kota Gorontalo

Berdasarkan ikhtisar data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo untuk pos PAD dan Belanja selama tiga tahun terakhir dari 2017, 2018, 2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 jumlah PAD berdasarkan anggaran yang ditetapkan sebesar 67.053.945 miliar, yang terealisasi sebesar 65.176.593 miliar. Hasil ini mengalami kenaikan 2018 sebesar

76.691.561 miliar terealisasi 67.102.488 miliar. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan 122.817.777 miliar terealisasi 99.030.153 miliar.

Untuk pos Belanja rata-rata jumlah yang dianggarkan selama 2017 s/d 2019 mengalami fluktuasi. Anggaran belanja tahun 2017 sebesar 88.542.695 miliar yang diserap sebesar 80.479.659 miliar, tahun 2018 anggaran turun 82.922.530 miliar yang terealisasi 78.212.311 miliar, dan tahun 2019 anggaran naik 83.537.542.689 miliar yang terealisasi 74.857.417.467 miliar rupiah. Penurunan jumlah belanja dari total yang dianggarkan tersebut terakumulasi pada pos belanja operasi dan belanja modal.

Berdasarkan ikhtisar dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di atas menunjukkan bahwa angka penganggaran dan yang terealisasi belum tepat, hal ini menunjukkan pemerintah belum memproyeksikan anggaran secara tepat. Selain itu dalam kelemahan penganggaran ini memiliki dampak yang menyebabkan hal-hal sebagai berikut: Kendala pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Rencana penyerapan anggaran belanja belum terproyeksi dengan baik, Tidak terlaksananya proyek yang dianggarkan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana perkembangan kinerja keuangan pada Badan Keuangan Kota Gorontalo dan mengharapkan Pemerintah dapat menyusun anggaran Pendapatan dan Belanja sesuai kebijakan umum APBD dengan memformulasikanya dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Ditinjau Dari Laporan Realisasi Anggaran”. Penelitian ini membahas permasalahan dari salah satu sudut pandang paling mendasar yaitu Analisis

Kinerja Keuangan yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran Kantor Badan Keuangan Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2017 samapi dengan Tahun 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas. Dapat diketahui bahwa Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah dengan instrument Laporan Realisasi Anggaran sangat penting dalam menciptakan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo,ditinjau dari rasio pendapatan?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo, ditinjau dari rasio belanja?

3.1 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud diadakanya penelitian ini adalah untuk memperoleh data berupa kinerja keuangan pemerintah.Disamping itu untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangannya.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang di uraikan diatas,maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan ditinjau dari rasio pendapatan,
2. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan ditinjau dari rasio belanja

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan acuan bagi penulis selanjutnya terutama mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah ditinjau dari Laporan Realisasi Anggaran.
2. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat melahirkan pemikiran dan pertimbangan terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) di Kantor Badan Keuangan Kota Gorontalo

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Definisi Kinerja

Menurut (Wibowo,2016) kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dengan pekerjaan tersebut atau tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu.

2.1.2 Kinerja keuangan Pemerintah Daerah

Menurut (sumarjo,2010) Kinerja Keuangan Pemerintah daerah adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan dengan memperhatikan keluaran dari kegiatan program yang akan atau telah dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam

mendukung berjalanya system pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya.

2.1.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah

Pengukuran Kinerja keuangan pemerintah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan, yaitu memperbaiki kinerja pemerintah daerah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2002). Tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Ulum (2009) sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja, serta membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah keputusan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Menurut (Halim 2007) pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolak ukur dalam:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama waktu periode tertentu.

2.1.4 Informasi Yang Digunakan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan

Adapun informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah sebagai berikut; Informasi Finansial penilaian kinerja finansial dilakukan dengan menganalisis varians antara kinerja aktual atau realisasi dengan yang dianggarkan analisis varians secara garis besar:

- a. Varians pendapatan (revenue variance)
- b. Varians Pengekuanan atau belanja (expenditure variance), yang terdiri dari:
 Varian belanja rutin (recurrent expenditure variance) dan Varian belanja atau modal (capital expenditure variance)
- c. Setelah analisis varians dilanjutkan dengan mengidentifikasi sumber penyebab terjadinya varians tersebut (apa, siapa atau bagaimana, kenapa

dan bagaimana) keterbatasan analisis varians adalah kesulitan menetapkan besarnya batasan varians.

2.1.5 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan ini untuk menciptakan akuntabilitas. Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik ini digunakan untuk memberikan informasi tentang keuangan dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan.

Menurut Mahmudi (2010) jenis-jenis laporan keuangan Pemerintah Daerah meliputi: 1) Neraca, 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 3) Laporan Arus Kas, 4) Catatan atas laporan keuangan (CaLK), 5) Lampiran laporan keuangan BUMD. Dari lima jenis laporan tersebut biasanya yang dipublikasikan di media massa hanya tiga laporan utama yaitu : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas.

Menurut Mahmudi (2010) disajikan elemen-elemen dari laporan keuangan adalah:

1. Elemen Neraca

Neraca pemerintah daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa aset, Kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama laporan yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening. Setiap rekening dirinci hingga level rincian objek. Penyajian di

laporan keuangan keuangan publikasian biasanya cukup ditampilkan rekening utama dan subrekening satu level dibawahnya

2. Elemen Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas empat pos utama yaitu:

a. Pendapatan,

Pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen yaitu:

- 1)Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD terdiri atas: 1. Pendapatan pajak daerah, 2. Pendapatan retribusi daerah daerah, 3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah.
- 2)Pendapatan Transfer, Pendapatan transfer meliputi: 1. transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan (dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum,dan dana alokasi khusus,2. transfer pemrintah pusat lainnya (dana otonomi khusus,dana alokasi khusus, 3. transfer pemerintah provinsi khusus untuk pemerintah kabupaten dan kota yaitu pendapatan bagi hasil pajak dan dana penyesuaian
- 3)Lain-lain pendapatan yang sah, lain-lain pendapatan yang sah meliputi; 10 pendapatan hibah.

b. Belanja

Pos belanja terdiri atas tiga komponen yaitu:

- 1) Belanja Operasi,Belanja operasi meliputi; 1. belanja pegawai,
- 2.belanja barang, 3. bunga, 4.subsidi, 5. hibah, 6. bantuan social

2) Belanja Modal. Belanja modal meliputi; 1) belanja tanah, 2) belanja peralatan dan mesin, 3) belanja gedung dan bangunan, 4) belanja jalan, irigasi, dan jaringan, 5) belanja aset tetap lainnya, 6) belanja aset lainnya.

3) Belanja Tak Terduga. Belanja Tak Terduga atau belanja lain-lain merupakan pengeluaran anggaran yang sifatnya tidak biasa dan tidak berulang atau rutin terjadi. Belanja tak terduga dapat berupa: 1) bantuan bencana alam, 2) bantuan bencana sosial, 3) bantuan korban politik.

c. Transfer.

Transfer pada dasarnya juga merupakan bagian dari belanja pemerintah daerah. Untuk pemerintah provinsi pengeluaran transfer berupa transfer bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota, meliputi; bagi hasil pajak, retribusi, dan pendataan lainnya ke kabupaten/ kota.

d. Pembiayaan

Pembiayaan dikategorikan menjadi dua yaitu;

- 1) penerimaan pembiayaan
- 2) pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran dicatat dalam pos pembiayaan netto.

e. Surplus(Defisit)

Surplus pada dasarnya selisih antara pendapatan dan belanja dicatat dalam pos surplus atau (defisit). Surplus adalah selisih lebih antara

pendapatan dan belanja selama satu periode anggaran, selain itu defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja selama satu periode anggaran.

f. SILPA (SIKPA)

SILPA sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah selama periode anggaran.

g. Elemen Laporan Arus Kas

Laporan arus kas dibagi dalam empat aktivitas utama yaitu; 1) arus kas dari aktivitas operasi, 2) arus kas dari aktivitas investasi, 3) arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan 4) arus kas dari aktivitas non anggaran dari masing-masing aktivitas tersebut di pilah lagi menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar sehingga di peroleh arus kas bersih dari setiap aktivitas.

h. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) merupakan penjelasan lebih rinci atas elemen-elemen dalam laporan keuangan, baik elemen neraca, laporan realisasi anggaran, maupun laporan arus kas, Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum, CaLK menjadi tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) atau kuas BUD untuk menyiapkannya.

2.1.6 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian Kinerja Keuangan. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim,2007).

Menurut Halim (2007) pihak-pihak yang berkepentingan dengan Rasio keuangan Pemerintah Daerah adalah:

1. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
2. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah bersedia member pinjaman maupun membeli obligasi.

Menurut Mahmudi (2010) analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara menganalisis setiap elemen yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu di analisis untuk dapat ,memberikan gambaran kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam

laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, social atau politik.

2.1.7 Teknik Analisis Laporan Keuangan

Menurut (Mahmudi 2010) analisis laporan keuangan memerlukan teknik tertentu agar kegiatan analisis tersebut bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Terdapat beberapa teknik analisis laporan keuangan yaitu:

1) Analisis Varians (Selisih)

Analisis varians pada umumnya digunakan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, yaitu dilakukan dengan cara mengevaluasi selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasi. Selisih anggaran dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu selisih yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang perlu dianalisis lebih dalam adalah terhadap selisih yang tidak menyenangkan.

2) Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja organisasi lain yang sejenis. Contoh analisis rasio keuangan yaitu: analisis aset, analisis likuiditas, solvabilitas, ekuitas, dll.

3) Analisis Pertumbuhan (Trend)

Analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Analisis pertumbuhan ini penting untuk mengetahui sejarah perkembangan kinerja.

Analisis pertumbuhan atau trend dapat diaplikasikan misalnya untuk menilai pertumbuhan aset, pendapatan, utang, surplus deficit, dan lain-lain

4) Analisis Regresi

Analisis regresi dilakukan untuk menguji pengaruh variable independen terhadap variable dependen. Analisis regresi bermanfaat untuk riset kebijakan publik yang hasilnya dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah.

5) Analisis prediksi

Data laporan keuangan juga dapat digunakan untuk analisis prediksi atau proyeksi. Misalnya untuk memprediksi pendapatan tahun depan dapat digunakan data tahun ini dan beberapa tahun lalu sebagai dasar prediksi

2.1.8 Analisis Pendapatan

Menurut Mahmudi (2010) secara umum pendapatan dapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu Melalui laporan realisasi anggaran, dapat melakukan analisis pendapatan dengan cara:

1. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah di informasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Pada prinsipnya anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah

dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendaoatan di bawah jumlah yang dianggarkan maka hal itu dinilai kurang baik. Analisis ini di rumuskan sebagai berikut (Mahmudi,2010):

Varians Pendapatan= *Realisasi- Anggaran Pendapatan*

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa perioide anggaran kinerja anggaranya mengalami pertumbuhan. Pendapatan secara positif ataukah negative. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungan meningkat. N Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negative maka hal itu menunjukan terjadi penurunan kinerja pendapatan dan hrus dicari penyebab penrunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunanya. Pertumbuhan pendapatan dapat dihitung dengan rumus (Mahmudi 2011)

Pertumbuhan Pendapatan Tahun t

3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Analisis rasio efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan yang telah ditetapkan setiap awal tahunnya (Mahmudi,2010). Rumus untuk menghitung rasio efektivitas PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik dengan menggunakan kriteria efektivitas kinerja keuangan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Efektivitas PAD

Kriteria	Persentasi Kinerja Keuangan
Sangat Efektif	>100
Efektif	100%
Cukup Efektif	90%-99%
Kurang Efektif	75%-89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber: Mahmudi 2010

2.1.9 Analisis Belanja

Analisis belanja dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran maka kita dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja yaitu:

1. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi yang dianggarkan.

Varians belanja daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Varians} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja disesuaikan dengan inflasi, kurs rupiah, perubahan layanan, dan makro ekonomi. Namun dengan paradigma baru otonomi daerah pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Analisis pertumbuhan belanja bertujuan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan tersebut rasional dan dapat

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Thn} - \text{Realisasi belanja thn}}{\text{Realisasi Belanja thn}}$$

dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja dihitung dengan rumus :

Pertumbuhan belanja Thn, =

3. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi belanja yaitu antara

60-90 persen. Rumus yang digunakan yaitu: $\frac{\text{realisasi belanja operasi}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\%$

4. Analisis Belanja modal terhadap Total Belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini pembaca

laporan keuangan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah antara 5-20 persen.

Rasio ini dirumuskan berikut: $\frac{\text{realisasi belanja modal}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\%$

5. Rasio efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi belanja bersifat absolute, artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk

$$\frac{\text{realisasi belanja}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\%$$

rasio efisiensi belanja (Mamhmudi,2010). Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio efisiensi belanja yaitu:

Rasio efisiensi belanja

Keputusan menteri dalam negeri nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja ditunjukkan pada table berikut ini:

Tabel 2.2
Rasio Efisiensi Belanja

Efisiensi Keuangan Pemerintah	Rasio Efisiensi Belanja
Sangat efisien	<60%
Efisien	60%-80%
Cukup efisien	80%-90%
Kurang Efisien	90%-100%
Tidak Efisien	>100%

Sumber: Mahmudi (2010)

Berdasarkan konsep diatas, maka dapat dirumuskan hasil rekapitulasi analisis Laporan Kinerja dengan menggunakan rasio-rasio tersebut diatas sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kriteria Analisis Laporan Kinerja

No	Analisis	Ukuran	Kriteria
1.	Analisis Varians Pendapatan	Meningkat	Baik
2.	Pertumbuhan Pendapatan	Meningkat	Baik
3.	Efektivitas PAD	>100%	Sangat Efektif
4.	Analisis Varians Belanja	Positif	Baik
5.	Pertumbuhan Belanja	Positif	Baik
6.	Belanja Operasi	60-90%	Baik
7.	Belanja Modal	5-10%	Baik
8.	Efisiensi Belanja	<100%	Sangat Efisiensi

2.1.10 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

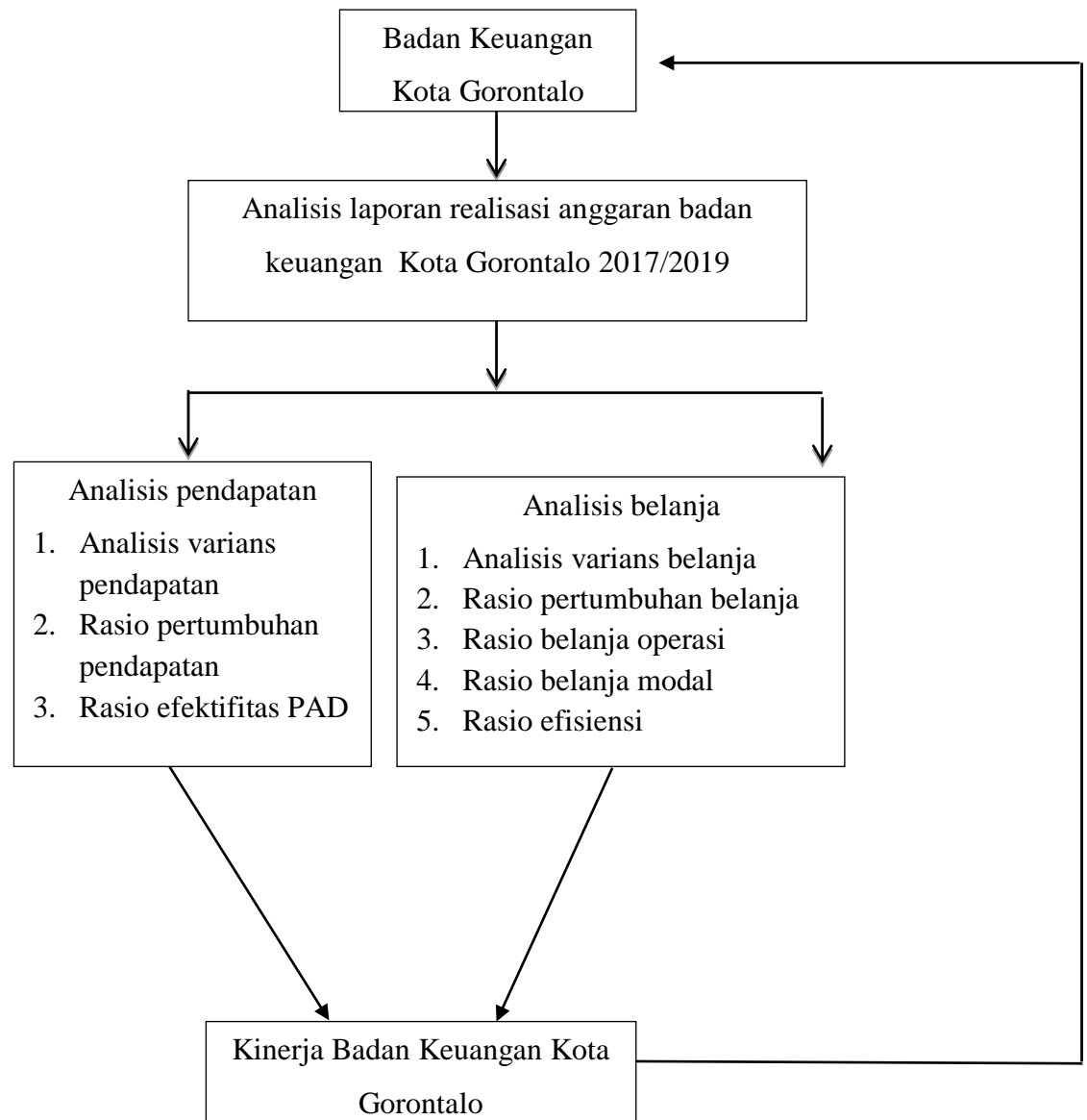
No.	Penelitian	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Reny Pujining Rahayu	2018	Laporan Realisasi Anggaran untuk menilai Kinerja Keuangan (Studi pada kantor dinas pendapatan daerah kota Kediri)	Tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan PAD di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri tahun anggaran 2014-2017 terbukti sangat efektif namun terjadi penurunan setiap tahunnya pada presentase tingkat efektivitas disebabkan menurunnya penerimaan PAD.
2	Fitriyah agustin	2007	Pengukuran Kinerja pemerintah daerah kabupaten bilitar.	Hasil penelitian ini adalah pemerintah daerah belum bias menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien karena masih banyak rasio-rasio yang menunjukkan kurangnya Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten bilitar dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya.

3.	Dora Detisa	2009	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam era otonomi (Studi pada Pemerintahan Naggroe Aceh Darusallam)''.	Kabupaten NAD menunjukkan hasil yang belum stabil karena masih mengalami presentase yang naik turun terhadap hasil perhitungan untuk rasio aktivitas menunjukkan hasil yang kurang efektif karena dana yang dimiliki pemerintah masi diprioritaskan untuk belanja rutin dari pada belanja pembangunan. Untuk rasio pertumbuhan menunjukkan kinerja yang kurang baik karena mengarah kepada trend yang negative
----	-------------	------	--	--

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan analisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi dilakukan dengan cara mengidentifikasi informasi yang tedapat dalam Laporan Realisasin Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Gorontalo pada Kantor Badan Keuangan Gorontalo. Tujuan mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam LRA tersebut yaitu untuk memperoleh informasi yang di butuhkan dengan menggunakan metode analsis vertical (statis), analisis horizontal, dan analisis rasio. Dalam analsis ini menggunakan analisis rasio untuk melengkapi informasi keuangan yang diperlukan sehingga memperoleh gambaran yang komperhensif mengenai kondisi perkembangan kinerja keuangan.

Untuk memperjelas konsep ini dan arah penelitian maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian seperti yang telah di uraikan dalam bab sebelumnya, maka yang menjadi obyek penelitian adalah Analisis Kinerja Keuangan Lokasi penelitian pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu Bagaimana kinerja keuangan pemerintah yang ditinjau dari laporan realisasi anggaran dari tahun 2017 sampai dengan 2019, menurut sugioyono (2015) kinerja keuangan, variabel kinerja keuangan akan dianalisis dengan menggunakan indikator pengukuran kinerja pendapatan dan belanja. Indikator pengukuran kinerja yang akan dianalisis adalah Analisis Pendapatan yang terdiri dari Rasio Varians Pendapatan, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Rasio efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD. Analisis Belanja akan diukur dengan indikator : Rasio Varians Belanja, Rasio Pertumbuhan Belanja, Rasio Belanja Operasi, Rasio Belanja Modal dan Efisiensi Belanja

3.2.2 Operasional Variabel

Untuk menemukan data apa yang di perlukan, maka terlebih dahulu perlu menjelaskan definisi operasional indikator yang digunakan dalam penelitian ini, seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa dalam menganalisis Kinerja Keuangan

Pemerintah, kita perlu menganalisis kinerja dengan menggunakan alat ukur berupa rasio. Adapun rasio-rasio yang digunakan alat ukur untuk analisis kinerja keuangan pemerintah terdiri atas: Analisis pendapatan yang terdiri dari Rasio Varians Pendapatan, Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Rasio Efektivitas PAD. Analisis Belanja akan di ukur dengan indikator: Rasio Varians Belanja, Rasio Pertumbuhan Belanja, Rasio Belanja Operasi, Rasio Belanja Modal dan Rasio Efisiensi Belanja. Maka dari itu penelitian ini dapat dioperasikan sebagai berikut;

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Rumus	Skala
Analisis Kinerja Keuangan Pemrintah Daerah	Analisis Pendapatan		
	1) Rasio Varians pendapatan	$\frac{\text{realisasi pendapatan tahun } xx}{\text{anggaran pendapatan tahun } x} \times 100\%$	Rasio
	2) Rasio Pertumbuhan pendapatan	$\frac{\text{pendapatan Th 1} - \text{pendapatan Th } (t - 1)}{\text{pendapatan Th } (t - 1)} \times 100\%$	Rasio
	3) Rasio Efektivitas PAD	$\frac{\text{realisasi pendapatan asli daerah}}{\text{target PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$	Rasio
	Analisis belanja		
	1) Rasio varians belanja	$\frac{\text{realisasi belanja tahun } x x}{\text{anggaran belanja tahun}} \times 100\%$	Rasio

	2) Rasio pertumbuhan belanja	$\frac{R. \text{belanja thn } 1 - R \text{ belanja thn } t - 1}{\text{realisasi belanja thn } t - 1} \times 100\%$	Rasio
	3) Rasio belanja operasi	$\frac{\text{realisasi belanja operasi}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$	Rasio
	4) Rasio belanja modal	$\frac{\text{realisasi belanja modal}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$	Rasio
	5) Rasio efisiensi belanja	$\frac{\text{realisasi belanja}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\%$	Rasio

Sumber : Mahmudi 2010

3.2.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis data

Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang tidak berbentuk angka-angka, yang umumnya diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait pada menjadi lokasi penelitian. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka, baik itu laporan keuangan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti laporan realisasi anggaran.

3.3.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Kantor Badan Keuangan Propinsi Gorontalo berupa data hasil wawancara penelitian dengan adalah Laporan Realisasi Anggaran untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir, yakni tahun 2016, 2017, 2018, 2019. Langkah-langkah dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data-data keuangan sehubungan dengan data yang dibutuhkan dalam rasio yang digunakan. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya seperti Laporan Realisasi Anggaran.
- 2) Mengelompokkan data-data keuangan sesuai yang tercantum dalam rumus rasio yang digunakan, dalam bentuk table.
- 3) Perhitungan nilai rasio kinerja keuangan pemerintah untuk tiga tahun terakhir dengan menggunakan rumus:

a. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang diaanggarkan. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan maka hal itu dinilai kurang baik.

Rumus yang digunakan adalah :
$$\frac{\text{realisasi pendapatan}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\%$$

b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran kinerja anggaranya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Pertumbuhan pendapatan dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{realisasi pendapatan Thn } t - \text{realisasi pendapatan Thn } t - 1}{\text{realisasi pendapatan Thnt} - 1} \times 100\%$$

c. Rasio Efektivitasn Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Analisis rasio efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan yang telah ditetapkan setiap awal tahunnya (Mahmudi, 2010). Rumus untuk menghitung rasio efektivitas PAD adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\%$$

d. Analisis Varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara belanja dengan anggaran. Rumus yang digunakan untuk mengukur analisis varians adalah: Untuk mencari selisih varians yaitu:

Analisis rasio varians = Realisasi Belanja-Anggaran Belanja

Untuk mencari presentase selisih:

Versentasi varians belanja : $\frac{\text{realisasi belanja}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\%$

e. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk menghitung perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pertumbuhan belanja dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{realisasi pendapatan Thn } t - \text{realisasi pendapatan Thn } t - 1}{\text{realisasi pendapatan Thnt} - 1} \times 100\%$$

f. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja. Rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{Rasio belanja operasi: } \frac{\text{realisasi belanja operasi}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

g. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja dengan total belanja daerah. Rasio ini dirumuskan berikut:

$$\text{Rasio belanja modal : } \frac{\text{realisasi belanja modal}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

h. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Rumus yang digunakan untuk mengukur efisiensi yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja : } \frac{\text{realisasi belanja}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat

Badan Keuangan Kota Gorontalo sebelumnya bernama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dirubah menjadi Badan Keuangan Kota Gorontalo berdasarkan Peraturan Walikota No. 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja. Badan Keuangan Kota Gorontalo dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Gorontalo melalui Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, dimana memiliki tugas didalam membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Gorontalo dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota Gorontalo. Jika dijabarkan satu-per satu, tugas dan fungsi Badan Keuangan Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi di atas, maka penjabaran Visi dan Misi dari Badan Keuangan Kota Gorontalo yakni sebagai berikut:

- a. Visi Badan Keuangan Kota Gorontalo:

“Menjadi Institusi Pengelola Keuangan yang Inovatif”

- b. Misi Badan Keuangan Kota Gorontalo:

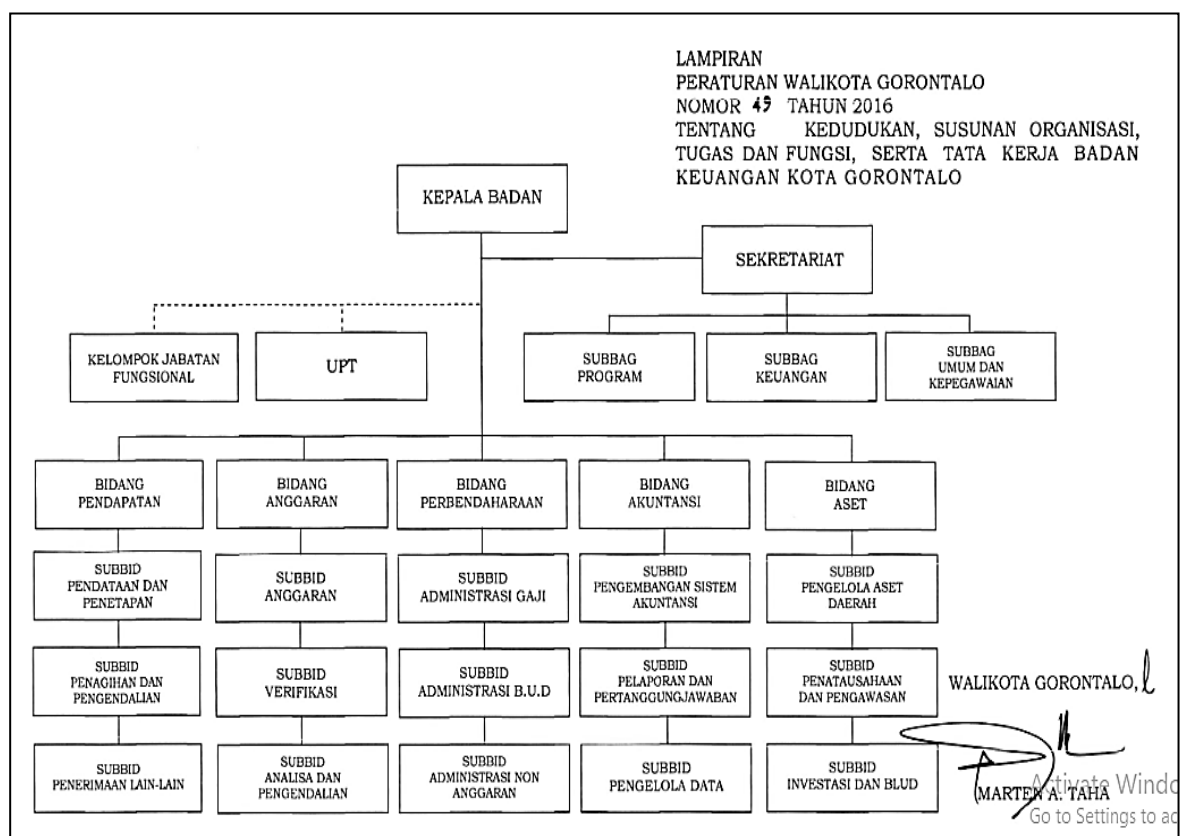
- 1) Meningkatkan Pendapatan Daerah;
- 2) Meningkatkan kapasitas SDM dan Disiplin Aparatur dalam pelaksanaan tugas;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja baik antar SKPD dan lembaga lain yang saling bekerja sama;
- 4) Meningkatkan pelayanan Administrasi yang Akuntabel guna mendukung Pencapaian Sasaran Kinerja;
- 5) Memantapkan Pelaksanaan Administrasi yang Akuntabel guna mendukung Pencapaian Sasaran Kinerja.

Adapun struktur organisasi Badan Keuangan Kota Gorontalo, jika didasarkan pada Peraturan Walikota No. 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, mencakup:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendapatan;

- d. Bidang Anggaran;
- e. Bidang Perbendaharaan;
- f. Bidang Akuntansi;
- g. Bidang Aset; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Lebih lengkapnya, berikut ini adalah gambar bagan organisasi Badan Keuangan Kota Gorontalo.



Gambar 4.1: Struktur Organisasi Badan Keuangan Kota Gorontalo

4.2 Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian, maka diperoleh laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Gorontalo, dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sebagai tolak ukur untuk menilai kondisi keuangan pemerintah. Tolak ukur yang digunakan dalam penelitian adalah analisis rasio yang menggambarkan bagaimana kondisi dan prestasi yang dicapai pemerintah kota dalam kurun waktu tertentu. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah kota, perlu di klasifikasikan rekening-rekening rasio kinerja keuangan yang meliputi rasio Pendapatan dan rasio Belanja. Berikut perhitungan rasio-rasio penelitian tersebut :

4.2.1 Pengukuran Kinerja Pendapatan

Adapun kinerja keuangan Badan Keuangan Kota Gorontalo jika ditinjau dari aspek pendapatan, maka dapat diukur dengan beberapa rasio keuangan sebagai berikut:

1. Pengukuran Rasio Varians Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan, dengan formulasi rumus sebagai berikut:

$$\text{Varians Pendapatan} = \text{Realisasi} - \text{Anggaran Pendapatan}$$

Berdasarkan formulasi di atas dan informasi data laporan keuangan Badan Keuangan Kota Gorontalo, maka perhitungan rasio varians pendapatan dapat diuraikan dalam table berikut:

Tabel 4.1
Perhitungan Varians Pendapatan
Tahun 2016

Pendapatan	Anggaran	Realisasi	Varians (Rp)	%	Kriteria
Pajak Daerah	46,850,000,000	45,676,661,215	1,173,338,785	97	Cukup Efektif
Retribusi	84,050,000	14,571,861	69,478,139	17	Tidak Efektif
Hasil yang Dipisahkan	4,000,000,000	1,401,966,083	2,598,033,917	35	Tidak Efektif
Lain-lain yg sah	4,424,000,000	3,720,299,258	703,700,742	84	Kurang Efektif
Total	55,358,050,000	50,813,498,417	4,544,551,583	92	Cukup Efektif

Tabel 4.2
Perhitungan Varians Pendapatan
Tahun 2017

Pendapatan	Anggaran	Realisasi	Varians (Rp)	%	Kriteria
Pajak Daerah	60,721,671,497	60,657,343,915	64,327,582	1.0	Tidak Efektif
Retribusi	119,050,000	8,526,400	110,523,600	0,7	Tidak Efektif
Hasil yang Dipisahkan	2,585,636,510	1,585,636,510	1,000,000,000	61	Tidak Efektif
Lain-lain yg sah	3,627,587,500	2,925,086,883	702,500,617	81	Tidak Efektif
Total	67,053,945,507	65,176,593,708	1,877,351,799	97	Cukup Efektif

Tabel 4.3
Perhitungan Varians Pendapatan
Tahun 2018

Pendapatan	Anggaran	Realisasi	Varians (Rp)	%	Kriteria
Pajak Daerah	60,721,671,497	60,657,343,915	64,327,582	1.0	Tidak Efektif
Retribusi	119,050,000	8,526,400	110,523,600	0,7	Tidak Efektif
Hasil yang Dipisahkan	2,585,636,510	1,585,636,510	1,000,000,000	61	Tidak Efektif
Lain-lain yg sah	3,627,587,500	2,925,086,883	702,500,617	81	Kurang Efektif
Total	67,053,945,507	65,176,593,708	1,877,351,799	97	Cukup Efektif

Tabel 4.4
Perhitungan Varians Pendapatan
Tahun 2019

Pendapatan	Anggaran	Realisasi	Varians (Rp)	%	Kriteria
Pajak Daerah	75,000,000,000	67,475,359,049	7,524,640,951	90	Kurang Efektif
Retribusi	269,050,000	100,865,913	168,184,087	37	Tidak Efektif
Hasil yang Dipisahkan	3,968,492,698	3,968,492,689	9	1.0	Tidak Efektif
Lain-lain yg sah	4,300,000,000	3,312,699,816	987,300,184	77	Tidak Efektif
Total	83,537,542,698	74,857,417,467	8,680,125,231	90	Cukup Efektif

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan table di atas, maka dapat diketahui bahwa varians pendapatan tahun 2017 sebesar 1.877.351.799,00 atau 2,80%, tahun 2018 sebesar Rp 9.484.724.981,00 atau 12,37 dan tahun 2019 sebesar 7.997.325.222,00 atau 9,57%. Nilai varians pendapatan Badan Keuangan Kota Gorontalo tahun 2017-2019 tersebut dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Berdasarkan hasil pengukuran varians pendapatan pada table dan grafik diatas menunjukan bahwa Badan Keuangan Kota Gorontalo memiliki nilai varians pendapatan tahun 2017-2019 yang cenderung mengalami fluktuasi dengan nilai positif.

2. Pengukuran Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan pendapatan digunakan untuk mengukur sejauh mana perkembangan pendapatan Badan Keuangan Kota Gorontalo dari tahun ke tahun, yakni 2017-2019. Adapun mengukur rasio pertumbuhan pendapatan digunakan formulasi berikut:

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Tahun } t = \frac{\text{pendapatan tahun } t - \text{Pendapatan tahun } (t-1)}{\text{anggaran belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi dan data laporan keuangan Badan Keuangan Kota Gorontalo, maka dapat dihitung besarnya rasio pertumbuhan pendapatan sebagai berikut

Tabel 4.5
Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan

Tahun	Tahun t	Tahun t-1	Pertumbuhan	%	Kriteria
2016	46,850,000,000	-	-	-	
2017	60,721,671,497	46,850,000,000	13,871,671,497	22,84	Tidak Efektif
2018	70,000,000,000	60,721,671,497	9,278,328,503	13,25	Tidak Efektif
2019	75,000,000,000	70,000,000,000	5,000,000,000	66,66	Tidak Efektif
Total	252,571,671,497	177,571,671,497	75,000,000,000	29,69	Tidak Efektif

Tabel 4.6
Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan
Pendapatan Retribusi Daerah

Tahun	Tahun t	Tahun t-1	Pertumbuhan	%	Kriteria
2016	84,050,000	-	-	-	
2017	119,050,000	84,050,000	35,000,000	29,3	Tidak Efektif
2018	45,000,000	119,050,000	(74,050,000)	64,55	Tidak Efektif
2019	269,050,000	45,000,000	224,050,000	83,23	Kurang Efektif
Total	517,150,000	248,100,000	269,050,000	52,05	Tidak Efektif

Tabel 4.7
Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan
Pendapatan Hasil Yang Dipisahkan

Tahun	Tahun t	Tahun t-1	Pertumbuhan	%	Kriteria
2016	4,000,000			-	-
2017	2,585,635,510	4,000,000	2,581,635,510	99,2	Cukup Efektif
2018	2,486,911,214	2,585,635,510	(9,724,296)	39,12	Tidak Efektif
2019	3,968,492,698	2,486,911,214	1,481,581,484	37,33	Tidak Efektif
Total	9,045,039,422	5,076,546,724	3,968,492,698	43,88	Tidak Efektif

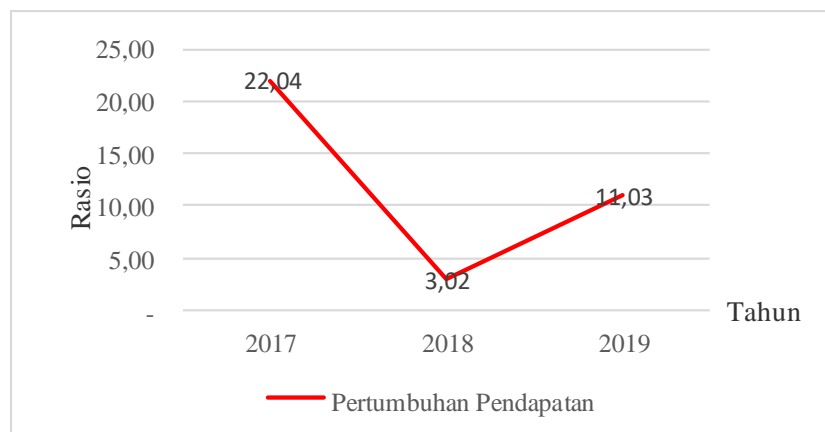
Tabel 4.8
Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan
Lain-lain Yang Sah

Tahun	Tahun t	Tahun t-1	Pertumbuhan	%	Kriteria
2016	4,424,000,000	-	-	-	-
2017	3,627,587,500	4,424,000,000	(796,412,500)	21,96	Tidak Efektif
2018	4,159,650,000	3,627,587,500	532,062,500	27,79	Tidak Efektif
2019	4,300,000,000	4,159,650,000	140,350,000	32,6	Tidak Efektif
Total	16,511,237,500	12,211,237,500	4,300,000,000	26,4	Tidak Efektif

Sumber : Data Olahan 2021

Berdasarkan table di atas, maka dapat diketahui pertumbuhan pendapatan tahun 2017, 2018, 2019. Dari Hasil pengukuran ini jika digambarkan dalam grafik, maka dapat disajikan sebagai berikut:

Grafik. 4.2
Badan Keuangan Kota Gorontalo
Perkembangan Pertumbuhan Pendapatan



Berdasarkan table dan gambar grafik di atas, menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan Badan Keuangan Kota Gorontalo mengalami trend fluktuatif.

3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Analisis rasio efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan yang telah ditetapkan setiap awal tahunnya. Rumus untuk menghitung rasio efektivitas PAD adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

Rasio Efektivitas =

Berdasarkan formulasi di atas dan laporan keuangan Badan Keuangan Kota Gorontalo, maka rasio efektivitas PAD dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 4.9
Perhitungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Pajak Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Kriteria
2016	84,050,000	14,571,861	17,33%	Tidak Efektif
2017	119,050,000	8,526,400	07,16%	Tidak Efektif
2018	45,000,000	11,544,756	25,65%	Tidak Efektif
2019	269,050,000	100,865,913	37,48%	Tidak Efektif
Total	517,150,000	135,508,930	38,64	Tidak Efektif

Tabel 4.10
Perhitungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Kriteria
2016	46,850,000,000	45,670,661,215	97,49%	Cukup Efektif
2017	60,721,671,497	60,657,343,915	99,89%	Cukup Efektif
2018	70,000,000,000	61,771,957,483	88,24%	Kurang Efektif
2019	75,000,000,000	67,475,359,049	89,96%	Kurang Efektif
Total	252,571,671,497	235,575,321,662	99,49%	Cukup Efektif

Tabel 4.11
Perhitungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Hasil Yang Dipisahkan

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Kriteria
2016	4,000,000,000	1,401,966,083	35,04%	Tidak Efektif
2017	2,585,636,510	1,585,636,510	61,32%	Tidak Efektif
2018	2,486,911,214	2,486,911,219	1%	Tidak Efektif
2019	3,968,492,698	3,968,492,698	1%	Tidak Efektif
Total	13,041,040,422	9,443,006,510	98%	Cukup Efektif

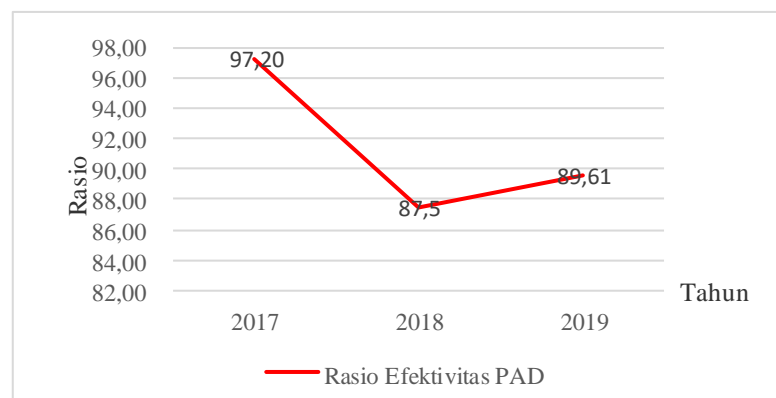
Tabel 4.12
Perhitungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Lain-lain Yang Sah

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Kriteria
2016	4,424,000,000	3,720,289,258	84,09%	Kurang Efektif
2017	3,627,587,500	2,925,086,883	80,63%	Kurang Efektif
2018	4,159,650,000	2,832,074,647	68,08%	Tidak Efektif
2019	4,300,000,000	3,312,699,816	77,03%	Tidak Efektif
Total	16,511,237,500	12,790,150,604	72%	Tidak Efektif

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan table di atas maka dapat diketahui tingkat efektivitas PAD pada Badan Keuangan Kota Gorontalo tahun 2017 sebesar 97,20%, tahun 2018 sebesar 87,50% dan tahun 2019 sebesar 89,61%. Jika nilai efektivitas PAD tersebut digambarkan dalam grafik, maka hasilnya akan tampak sebagai berikut:

Grafik. 4.3
Badan Kuangan Kota Gorontalo
Perkembangan Efektivitas PAD



Berdasarkan table dan gambar grafik di atas menunjukkan nilai rasio efektivitas PAD pada Badan Keuangan Kota Gorontalo menunjukkan trend fluktuatif, dimana ditahun 2017 nilai rasio efektivitas PAD sebesar 97,2% dan mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi sebesar 87,50%, dan sedikit mengalami peningkatan ditahun 2019 sebesar 89,61%. Adapun nilai rasio tertinggi terjadi pada tahun 2018, jika dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya.

4.2.2 Pengukuran Kinerja Belanja

Adapun kinerja keuangan Badan Keuangan Kota Gorontalo jika ditinjau dari aspek belanja, maka dapat diukur dengan beberapa rasio keuangan sebagai berikut:

1. Rasio Varians Belanja

Rasio varians belanja digunakan untuk mengukur besarnya selisih belanja, dimana nilai realisasi belanja tidak boleh melebihi nilai anggaran belanja. Varians belanja daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Varians} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Berdasarkan rumus dan laporan keuangan Badan Keuangan Kota Gorontalo, maka rasio varians belanja tahun 2017-2019 dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 4.13
Perhitungan Varians Belanja
Tahun 2016

Belanja	Anggaran	Realisasi	Varians (Rp)	%	Kriteria
Belanja tdk langsung	49,567,156,657	46,901,682,944	2,665,473,713	26,5	Sangat Efisien
Belanja langsung	39,406,271,373	33,626,378,747	5,779,892,626	77,9	Efisien
Total	88,973,428,030	80,528,061,691	8,445,366,339	45,3	Sangat Efisien

Tabel 4.14
Perhitungan Varians Belanja
Tahun 2017

Belanja	Anggaran	Realisasi	Varians (Rp)	%	Kriteria
Belanja tdk langsung	47,431,155,561	46,157,237,000	1,273,918,561	27,3	Sangat Efisien
Belanja langsung	41,111,539,870	34,322,422,173	6,789,117,697	89,1	Cukup Efisien
Total	88,542,695,431	80,479,659,173	8,063,036,258	9,11	Sangat Efisien

Tabel 4.15
Perhitungan Varians Belanja
Tahun 2018

Belanja	Anggaran	Realisasi	Varians (Rp)	%	Kriteria
Belanja tdk langsung	40,336,738,595	39,695,230,105	641,508,490	41,5	Sangat Efisien
Belanja langsung	42,585,792,107	38,517,081,646	4,068,710,461	68,7	Efisien
Total	82,922,530,702	78,212,311,751	4,710,218,951	-5,68	Sangat Efisien

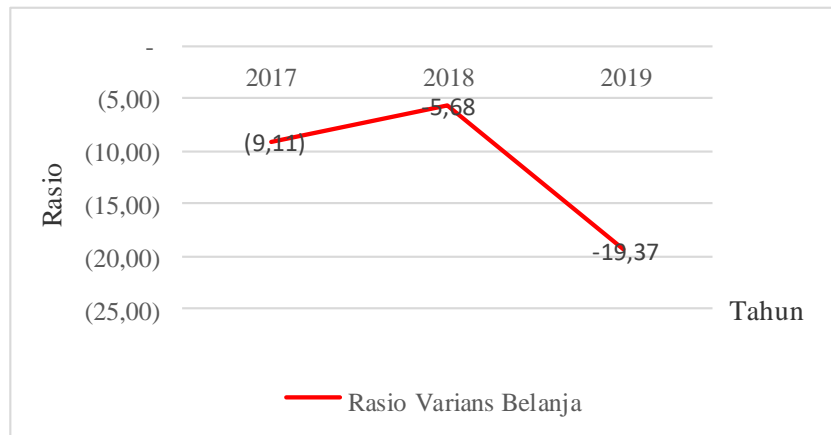
Tabel 4.16
Perhitungan Varians Belanja
Tahun 2019

Belanja	Anggaran	Realisasi	Varians (Rp)	%	Kriteria
Belanja tdk langsung	85,760,640,630	66,348,986,435	19,411,654,195	19,4	Sangat Efisien
Belanja langsung	37,057,136,797	32,681,166,688	4,375,970,109	37,5	Sangat Efisien
Total	122,817,777,427	99,030,153,123	23,787,624,304	-19,37	Sangat Efisien

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa rasio varians belanja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo bertanda negatif dimana nilai tahun 2017 sebesar -9,11%, tahun 2018 sebesar -5,68% dan tahun 2019 sebesar -19,37%. Hasil perhitungan tersebut jika digambarkan dalam grafik maka akan tampak sebagai berikut:

Grafik. 4.4
Badan Keuangan Kota Gorontalo
Perkembangan Varians Belanja



Berdasarkan table dan gambar grafik di atas maka dapat diketahui nilai rasio varians belanja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan mengalami penurunan, dimana tahun 2017 memiliki nilai rasio sebesar -9,11%, tahun 2018 naik sebesar -5,68% akan tetapi pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan pada angka -19,37%. Nilai rasio varians belanja bertan negatif, dengan nilai rasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

2. Rasio Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bertujuan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja dihitung dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan belanja Thn,} = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn} - \text{Realisasi belanja thn}}{\text{Realisasi Belanja thn}}$$

Berdasarkan formulasi di atas dan data laporan keuangan Badan Keuangan

Kota Gorontalo, maka rasio pertumbuhan belanja dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 4.17
Perhitungan Pertumbuhan Belanja
Belanja Tidak Langsung

Tahun	Tahun t	Tahun t-1	Pertumbuhan	%	Kriteria
2016	46,901,682,944	-	-	-	-
2017	46,157,237,000	46,901,682,944	(744,445,944)	44,4	Sangat Efisien
2018	39,695,230,105	46,157,237,000	(6,462,006,895)	46,2	Sangat Efisien
2019	66,348,986,435	39,695,239,105	26,653,756,330	53,3	
Total	199,103,136,484	132,754,159,049	66,348,977,435	2,90	-

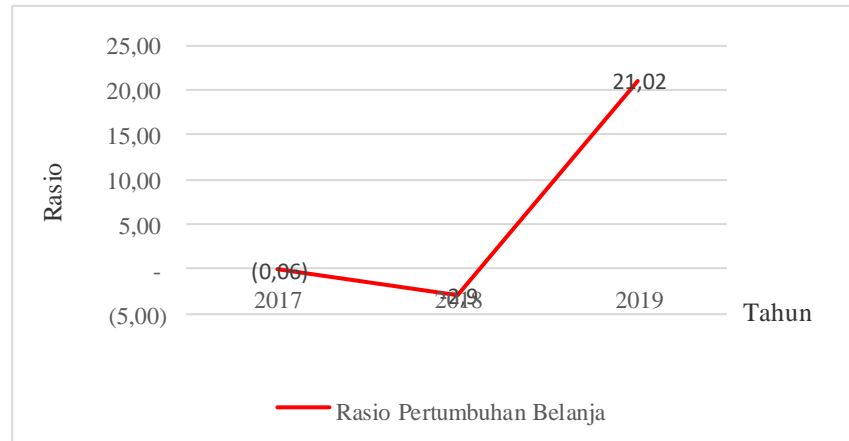
Tabel 4.18
Perhitungan Pertumbuhan Belanja
Belanja Langsung

Tahun	Tahun t	Tahun t-1	Pertumbuhan	%	Kriteria
2016	33,626,378,743	-	-	-	
2017	34,322,422,173	33,626,378,744	696,043,426	3,4	Sangat Efisien
2018	38,517,081,646	34,322,422,173	4,194,659,473	4,6	Sangat Efisien
2019	32,681,166,688	38,517,081,646	(5,835,914,958)	35,9	Sangat Efisien
Total	139,147,049,250	106,465,882,563	32,681,166,687	21,2	-

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan table di atas, maka dapat diketahui pertumbuhan belanja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo tahun 2017 sebesar -0,06%, tahun 2018 sebesar -2,90% dan tahun 2019 sebesar 21,02%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, jika digambarkan dalam grafik maka akan tampak sebagai berikut:

Grafik. 4.5
Badan Keuangan Kota Gorontalo
Perkembangan Pertumbuhan Belanja



Berdasarkan table dan gambar grafik di atas menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan belanja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo menunjukkan tren peningkatan, dimana tahun 2017 nilai rasio bertanda negatif sebesar -0,06%, tahun 2018 sedikit mengalami penurunan sebesar -0,290, akan tetapi pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 21,02%. Nilai rasio tertinggi terjadi pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya serta nilai rasio bertanda positif.

3. Rasio Belanja Operasi

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi.

Rumus yang digunakan yaitu
$$\frac{\text{realisasi belanja operasi}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi dan data keuangan dari laporan keuangan Badan Keuangan Kota Gorontalo, maka rasio belanja operasi dapat dihitung sebagai berikut

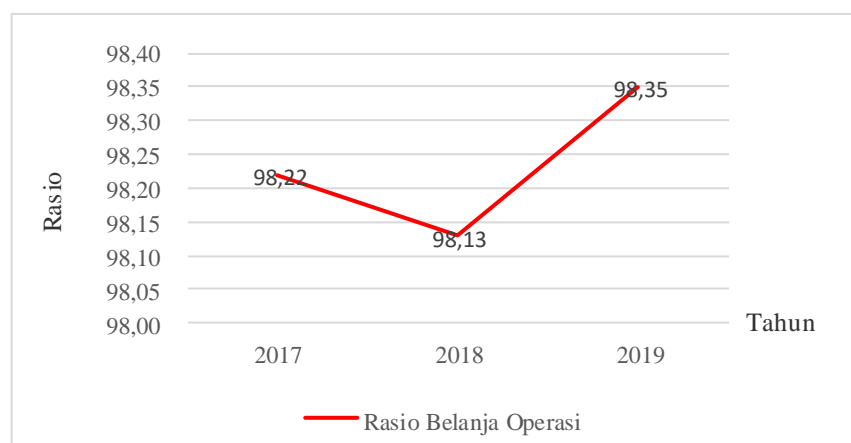
Tabel 19. Rasio Belanja Operasi

Tahun	Tahun		
	2017	2018	2019
Belanja Tidak Langsung	46.157.237.000	39.695.230.105	66.348.986.435
Belanja Langsung:			
- <i>Belnja Pegawai</i>	12.048.718.000	12.546.799.500	14.402.867.832
- <i>Belanja Brg dan Jasa</i>	20.838.242.307	24.505.474.326	16.643.826.066
Jumlah Belanja Langsung	32.886.960.307	37.052.273.826	31.046.693.898
Total Belanja Operasi (Rp)	79.044.197.307	76.747.503.931	97.395.680.333
Total Belanja	80.479.659.173	78.212.311.751	99.030.153.123
Rasio Belanja Operasi	98,22%	98,13%	98,35%

Sumber : Data diolah 2021

Bedasarkan table di atas, maka dapat diketahui besarnya nilai rasio belanja terhadap total belanja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo, dimana tahun 2017 sebesar 98,22%, tahun 2018 sebesar 98,13 dan tahun 2019 sebesar 98,35. Nilai rasio tersebut jika digambarkan dalam grfaik, maka dapat disajikan sebagai berikut:

Grafik. 4.6
Badan Kuangan Kota Gorontalo
Perkembangan Belanja Operasi



Berdasarkan table dan gambar grafik rasio belanja operasi terhadap total belanja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo menunjukkan nilai tren yang relative stagnan diangka 98% pada tiga tahun terakhir yakni tahun 2017 sebesar 98,22%, tahun 2018 sebesar 98,13% dan tahun 2019 sebesar 98,35%. Baik dari tahun 2017 hingga tahun 2019, kenaikan nilai belanja operasi masih terhitung realtif kecil.

4. Rasio Belanja Modal

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja dengan total belanja daerah.

Rasio ini dirumuskan berikut: $\frac{\text{realisasi belanja modal}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\%$

Berdasarkan rumus dan data laporan keuangan pada Badan Keuangan Kota Gorontalo, maka dapat dihitung nilai rasio sebagai berikut:

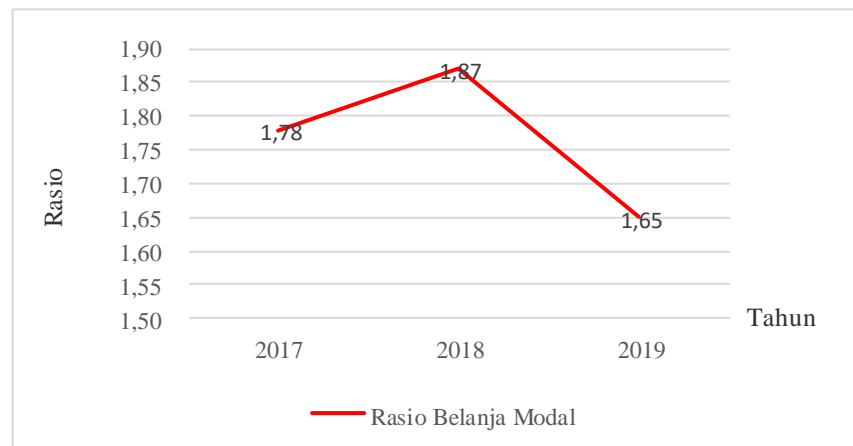
Tabel 4.20 Rasio Belanja Modal

Tahun	Total Belanja (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Persentase
2017	80.479.659.173,00	1.435.461.866,00	1,78%
2018	78.212.311.751,00	1.464.807.820,00	1,87%
2019	99.030.153.123,00	1.634.472.790,00	1,65%

Sumber Data : Olahan 2021

Berdasarkan table dia tas menunjukkan nilai rasio belanja modal pada Badan Keuangan Kota Gorontalo tahun 2017 sebesar 1,78%, tahun 2018 sebesar 1,87% dan tahun 2019 sebesar 1,65%. Hasil perhitungan rasio belanja modal tersebut jika digambarkan dalam grafik, maka akan tampak sebagai berikut:

Grafik. 4.7
Badan Keuangan Kota Gorontalo
Perkembangan Belanja Modal



Berdasarkan table dan gambar grafik diatas menunjukkan nilai rasio belanja modal yang masih tergolong relative stagnan terutama di tiga tahun terakhir yakni tahun 2017, 2018 dan 2019 yang memiliki perbedaan nilai rasio yang relatif kecil dikisaran 1,5%-1,9%, dimana angka-angka tersebut masi tergolong relatif kecil dan tidak memiliki perbedaan angka yang cukup besar dengan tahun-tahun lainnya.

5. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi belanja bersifat absolute, artinya tidak ada standar baku yang di anggap baik untuk rasio efisiensi belanja. Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio efisiensi belanja yaitu:

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{realisali belanja}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\%$$

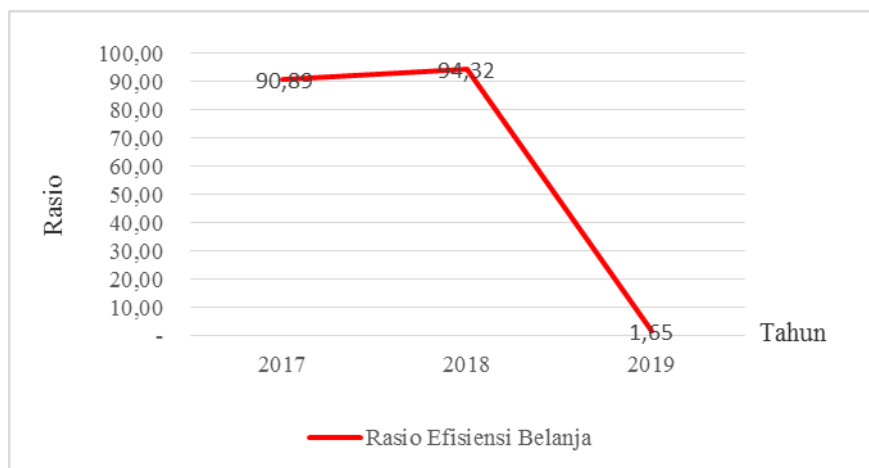
Berdasarkan formulasi di atas dan data laporan keuangan pada Badan Keuangan Kota Gorontalo, maka nilai rasio efisiensi belanja dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 4.21 Rasio Efisiensi Belanja

Tahun	Total Belanja		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2017	88.542.695.431,00	80.479.659.173,00	90,89%
2018	82.922.530.702,64	78.212.311.751,00	94,32%
2019	122.817.777.427,00	99.030.153.123,00	80,63%

Berdasarkan table rasio efisiensi belanja diatas maka dapat diketahui bahwa nilai rasio efisiensi belanja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo tahun 2017 sebesar 90,89%, tahun 2018 sebesar 94,32% dan tahun 2019 sebesar 80,63%. Nilai rasio efisiensi belanja tersebut jika digambarkan dalam grafik, maka dapat disajikan sebagai berikut:

Grafik. 4.8
Badan Keuangan Kota Gorontalo
Perkembangan Efisiensi Belanja



Berdasarkan table dan gambar diatas menunjukkan nilai rasio efisiensi belanja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo yang cenderung mengalami

fluktuatif, dimana di tahun 2017 nilai rasio sebesar 90,89%, mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 94,32%, akan tetapi di tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan pada angka sebesar 80,63%.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Kinerja Keuangan Badan Keuangan Kota Gorontalo Ditinjau Dari Aspek Pendapatan

Kinerja keuangan Badan Keuangan Kota Gorontalo jika dilihat dari aspek pendapatan, diukur dari tiga komponen yakni varians pendapatan, pertumbuhan pendapatan dan efektivitas PAD. Hasil pengukuran rasio varians pendapatan menunjukkan selama tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2017, 2018 dan 2019 menunjukkan nilai varians pendapatan yang fluktuatif, dengan nilai varians pendapatan terendah tahun 2017 sebesar Rp 1.877.351.799 atau sebesar 2,80% dan varians pendapatan tertinggi tahun 2018 dengan nilai Rp 9.484.724.981 atau sebesar 12,37% jika dibandingkan dengan pendapatan yang dianggarkan. Sedangkan tahun 2019 masih menunjukkan nilai varians pendapatan yang cukup besar yakni senilai Rp 7.997.325.222 atau sebesar 9,57% dari total pendapatan yang dianggarkan. Hasil ini dinilai masih kurang baik, nilai varians pendapatan yang masih terlalu besar menunjukkan kinerja pendapatan belum optimal, seperti yang jelaskan oleh Mahmudi (2010) dimana pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan maka hal itu dinilai kurang baik.

Kinerja pendapatan Badan Keuangan Kota Gorontalo jika diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan tren fluktuatif, dengan nilai pertumbuhan pendapatan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 22,04% sedangkan terendah ditahun 2018 sebesar 3,02%. Akan tetapi nilai-nilai pertumbuhan tersebut masih dalam angka yang positif, yang menunjukkan nilai pertumbuhan pendapatan yang baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2010) dimana analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran kinerja anggaranya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negative. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungan meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negative maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunan kinerja pendapatan.

Kinerja pendapatan pada Badan Keuangan Kota Gorontalo jika diukur dengan rasio efektivitas PAD menunjukkan tren yang fluktuatif dengan nilai tertinggi pada tahun 2017 sebesar 97,20% dan nilai terendah pada tahun 2018 pada angka 87,50%. Adapun nilai-nilai hasil pengukuran rasio tahun 2017, 2018 dan 2019 jika dibandingkan dengan standar rasio ada efektivitas menunjukkan tahun 2017 yakni 97,20% masuk dalam kriteria cukup efektif (90%-99%). Sedangkan tahun 2018 dan 2019 (87,50% dan 89,61%) masuk dalam kriteria kurang efektif (75%-89%).

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui nilai rasio efektivitas PAD pada Badan Keuangan Kota Gorontalo memiliki kinerja yang kurang baik pada dua

tahun terakhir, yang menunjukkan kecenderungan penurunan nilai efektivitas. Semakin rendah nilai efektivitas PAD maka semakin rendah kinerja pendapatan pada Badan Keuangan Kota Gorontalo. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2010) dimana semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik, sebaliknya semakin rendah rasio efektivitas maka menggambarkan kemampuan daerah yang semakin buruk.

Oleh karena itu, secara keseluruhan dapat diketahui kinerja pendapatan Badan Keuangan Kota Gorontalo masih tergolong kurang baik dan belum optimal. Varians pendapatan masih terlalu besar sehingga kecenderungan penerimaan pendapatan belum optimal. Nilai rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio efektivitas PAD yang fluktuatif dengan nilai rasio yang masih rendah dan mengalami penurunan ditahun-tahun terakhir, menjadi indikator didalam memberikan gambaran bahwa kondisi kinerja keuangan dari aspek pendapatan pada Badan Keuangan Kota Gorontalo tergolong masih kurang baik dan belum optimal.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Rahayu (2018) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri yang juga menunjukkan bahwa tahun anggaran 2014-2017 terbukti sangat efektif namun terjadi penurunan setiap tahunnya pada presentase tingkat efektivitas disebabkan menurunnya penerimaan PAD.

4.3.2 Kinerja Keuangan Badan Keuangan Kota Gorontalo Ditinjau Dari Aspek Belanja

Pengukuran kinerja keuangan Badan Keuangan Kota Gorontalo jika dilihat dari aspek belanja telah dinilai dan dianalisis dengan menggunakan rasio varians belanja, pertumbuhan belanja, rasio belanja operasi, rasio belanja modal dan rasio efisiensi belanja. Jika dilihat dari hasil pengukuran varians belanja menunjukkan nilai tren yang fluktuatif dengan nilai varians belanja tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp 23.787.624.303 atau sebesar 19,37% dan nilai terendah pada tahun 2018 sebesar Rp 4.710.218.951 atau sebesar 5,68% dari total belanja yang dianggarkan. Selain itu juga, nilai varians menunjukkan angka negatif, yang berarti bahwa nilai realisasi belanja masih dibawah dari nilai belanja yang dianggarkan atau dalam arti lain realisasi belanja tidak melebihi dari nilai belanja yang dianggarkan. Kondisi ini dinilai baik, karena menurut Mahmudi (2010) anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi yang dianggarkan.

Jika dinilai kinerja belanja Badan Keuangan Kota Gorontalo dari hasil pengukuran pertumbuhan belanja menunjukkan tren yang fluktuatif dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 21,02% dan nilai terendah sebesar -2,90%. Selain itu juga, tahun 2017 dan 2018 nilai pertumbuhan belanja berada pada angka negatif, yang artinya selama dua tahun tersebut telah terjadi penurunan pertumbuhan belanja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo, akan

tetapi pada tahun 2019 nilai rasio pertumbuhan kembali mengalami peningkatan yang signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2010) dimana umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja disesuaikan dengan inflasi, kurs rupiah, perubahan layanan, dan makro ekonomi. Namun dengan paradigma baru otonomi daerah pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Analisis pertumbuhan belanja bertujuan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kinerja belanja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo jika diukur dari analisis belanja operasi terhadap total belanja menunjukkan nilai tren yang stagnan pada angka 97%-98%, terutama pada tiga tahun terakhir berturut-turut pada angka 98,22%, 98,13% dan 98,35%. Nilai belanja operasi tersebut terlalu tinggi dan nilai tidak baik karena tidak proporsional dengan nilai belanja lainnya pada Badan keuangan Kota Gorontalo. Hasil ini jika dibandingkan dengan standar porsi belanja operasi yang ideal yakni 60-90%, maka nilai rasio belanja operasi tidak memenuhi kriteria standar porsi ideal dari belanja operasi tersebut. Nilai belanja operasi yang terlalu tinggi menunjukkan Badan Keuangan Kota Gorontalo selama empat tahun terakhir lebih banyak menghabiskan anggaran pada program atau kegiatan rutin saja yang hanya memiliki manfaat kurang dari satu tahun. Hal ini seperti dijelaskan oleh Mahmudi (2010) dimana belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga

belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang.

Sebaliknya, pengukuran nilai belanja modal terhadap total belanja pada Badan Keuangan Kota Gorontalo menunjukkan hasil yang cenderung relatif lebih kecil dari total porsi anggaran belanja ada. Hasil rasio tahun 2017-2019 menunjukkan nilai belanja hanya sebesar 1,78%, 1,87% dan 1,65%. Angka rasio masi terlihat stagnan pada angka 1-2% dan jika dibandingkan dengan standar idel belanja modal yani 5-20%, maka angka-angka rasio tersebut masih terlalu jauh dari standar rasio yang idel atas belanja modal. Dari hasil pengukura ini maka dapat dijelaskan bahwa Badan Keuangan Kota Gorontal memiliki nilai porsi belanja modal yang sangat kecil dan tidak ideal dari total belanja yang dianggarkan selama empat tahun terakhir. Padahal kita ketahui bersama bahwa belanja modal merupakan komponen belanja yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun dan memiliki nilai investasi. Hal ini seperti dijelaskan oleh Mahmudi (2010) bahwa rasio ini pembaca laporan keuangan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan.

Kinerja belanja pada Badan Keuangan Kota Gorontal jika ditindau dari perngukuran tingkat efisiensi belanja, menunjukkan nilai rasio selama tahun 2017-2019 masing-masing sebesar 90,89%, 94,32% dan 80,63% dengan teren yang fluktuatif dengan nilai rasio terendah terjadi pada tahun 2019. Berhdasarkan hasil pengukuran tersebut dapat diketahui bahwa nilai rasio belanja masih dalam angka yang baik dan wajar karena tidak melebihi 100% (>100). Jika dibandingkan

dengan standar rasio efisiensi belanja Mahmudi (2010) tahun 2017-2018 masuk dalam kriteria kurang efisien (90%-100%), sedangkan tahun 2019 masuk dalam kriteria cukup efisien (80%-90%).

Oleh karena itu, secara keseluruhan kinerja keuangan pada Badan Keuangan Kota Gorontalo ditinjau dari aspek belanja masi dalam kondisi yang baik, beberapa rasio menunjukkan kegiatan belanja masi tergolong pada angka yang tidak melebihi dari dana yang dianggarkan atau rasio realisasi belanja masih kurang dari 100%. Sehingga kegiatan efisiensi belanja masi dapat dilaksanakan. Akan tetapi, kekerungannya terletak pada porsi belanja operasi dan belanja modal yang dinilai masih didominasi oleh belanja operasi yang nilainya sangat besar jika dibandingkan dengan porsi belanja modal. Belanja modal memiliki porsi yang sangat kecil dan dibawah standar ideal yang diharapkan.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Destisa (2009) pada Kabupaten NAD dimana rasio aktivitas menunjukkan hasil yang kurang efektif karena dana yang dimiliki pemerintah masi diprioritaskan untuk belanja rutin dari pada belanja pembangunan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab dia atas maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa :

1. Perkembangan kinerja keuangan pada Badan Keuangan Kota Gorontalo jika ditinjau dari aspek pendapatan masih tergolong kurang baik dan belum optimal, dimana nilai varians pendapatan masih terlalu besar sehingga kecenderungan penerimaan pendapatan belum optimal. Nilai rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio efektivitas PAD yang fluktuatif dengan nilai rasio yang masih rendah dan mengalami penurunan ditahun-tahun terakhir.

Perkembangan kinerja keuangan pada Badan Keuangan Kota Gorontalo jika ditinjau dari aspek belanja masih dalam kondisi yang baik, beberapa rasio menunjukkan kegiatan belanja masih tergolong pada angka yang tidak melebihi dari dana yang dianggarkan atau rasio realisasi belanja masih kurang dari 100%. Namun demikian, porsi belanja operasi masih lebih besar nilainya jika dibandingkan dengan porsi belanja modal dengan nilai porsi yang tidak wajar jika dibandingkan dengan standar porsi yang ideal, baik belanja operasi maupun belanja modal.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Pimpinan Badan Keuangan Kota Gorontalo untuk lebih meningkatkan upaya-upaya dalam mengoptimalkan kinerja keuangan dari

aspek penerimaan. Nilai rasio penerimaan PAD masi terlalu rendah sehingga kebijakan yang dapat melahirkan inovasi terhadap peningkatan penerimaan sangat dibutuhkan, baik penrimaan yang bersumber dari PAD maupun dari penerimaan pendapatan selain dari PAD.

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat melakukan penelitian sehubungan dengan proporsi belanja baik belanja operasi dan belanja modal. Banyak hasil penelitin pada daerah-daerah di Indonesia menunjukan kecenderungan porsi belanja operasi lebih mendominasi dibandingkan dengan belanja modal, sedangkan belanja operasi nilai manfaatnya hanya dapat dirasakan kurang dari satu tahun dan bersifat belanja rutin. Berbeda dengan belanja modal yang merupakan nilai investasi yang dapat memberikan dampak manfaat jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman (2013). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada RSUD Muhammadiyah Ponorogo Periode 2009-2013. Skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Emba (2015) Vol.3. Jurnal Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
- _____ (2019) Vol.7. Jurnal Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2016-2017.
- Fitriyah Agustina (2007). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bilitar. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang
- Jatmiko (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Ditinjau Dari Prespektif Islam. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Tulungagung
- Niken Martia Pratiwi (2015) .Evaluasi kinerja dan kemampuan keuangan daerah pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan aset. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Nining Yunia Artanti (2010). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Studi Pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2007. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
- Puput Risky Pramita (2015). Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kebumen. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Rahmawati (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah ditinjau Dari LRA Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo
- Runik Puji Rahayu (2016). Jurnal Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Kabupaten Pemekasan

LAMPIRAN



Dok: Badan Keuangan Kota gorontalo 16/2/21



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016

Urusan Pemerintahan Unit Organisasi		1.20 : 1.20.1.20.05	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Kekuasaan, Perangkat Daerah, Kupegawasan DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		REALISASI			LEBI
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL			
4	PENDAPATAN	55.358.050.000,00	0,00	50.813.488.417,00	50.813.488.417,00			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	55.358.050.000,00	0,00	50.813.488.417,00	50.813.488.417,00			
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	46.850.000.000,00	0,00	45.676.661.215,00	45.676.661.215,00			
4.1.1.01	Pajak Hotel	7.000.000.000,00	0,00	6.557.409.228,00	6.557.409.228,00			
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	3.000.000.000,00	0,00	3.113.677.998,00	3.113.677.998,00			
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	500.000.000,00	0,00	656.175.216,00	656.175.216,00			
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	800.000.000,00	0,00	891.503.187,00	891.503.187,00			
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	1.670.000.000,00	0,00	1.295.851.729,00	1.295.851.729,00			
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	30.000.000,00	0,00	34.092.511,00	34.092.511,00			
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	1.000.000.000,00	0,00	78.630.337,00	78.630.337,00			
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	0,00	0,00	487.478.250,00	487.478.250,00			
4.1.1.01.15	Gubuk Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1.02	Pajak Restoran	7.500.000.000,00	0,00	8.088.894.445,00	8.088.894.445,00			
4.1.1.02.01	Restoran	4.000.000.000,00	0,00	4.784.214.268,00	4.784.214.268,00			
4.1.1.02.02	Rumah Makan	3.000.000.000,00	0,00	2.612.960.066,00	2.612.960.066,00			
4.1.1.02.03	Café	450.000.000,00	0,00	510.012.496,00	510.012.496,00			
4.1.1.02.05	Katering	50.000.000,00	0,00	181.440.415,00	181.440.415,00			
4.1.1.02.06	Warung	0,00	0,00	267.200,00	267.200,00			
4.1.1.03	Pajak Hiburan	2.500.000.000,00	0,00	2.555.845.698,00	2.555.845.698,00			
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	1.200.000.000,00	0,00	1.533.574.461,00	1.533.574.461,00			
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00			
4.1.1.03.07	Karaoke	500.000.000,00	0,00	282.437.038,00	282.437.038,00			
4.1.1.03.08	Klub Malam	35.000.000,00	0,00	36.934.563,00	36.934.563,00			
4.1.1.03.10	Permainan Billar	35.000.000,00	0,00	28.747.925,00	28.747.925,00			
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	700.000.000,00	0,00	605.050.281,00	605.050.281,00			
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	10.000.000,00	0,00	9.808.050,00	9.808.050,00			
4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	20.000.000,00	0,00	23.785.230,00	23.785.230,00			
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	0,00	0,00	20.036.150,00	20.036.150,00			
4.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00			
4.1.1.03.21	Pajak kegiatan hiburan lainnya	0,00	0,00	14.482.000,00	14.482.000,00			

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Printed By Sindo

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBI
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.1.04	Pajak Reklame	2.000.000.000,00	0,00	1.678.773.677,00	1.678.773.677,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	1.188.000.000,00	0,00	1.571.931.660,00	1.571.931.660,00	
4.1.1.04.02	Reklame Kain	550.000.000,00	0,00	85.719.667,00	85.719.667,00	
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	75.000.000,00	0,00	4.108.325,00	4.108.325,00	
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	175.000.000,00	0,00	13.405.000,00	13.405.000,00	
4.1.1.04.09	Reklame Film/Slide	2.000.000,00	0,00	284.025,00	284.025,00	
4.1.1.04.11	Reklame Lainnya	10.000.000,00	0,00	3.325.000,00	3.325.000,00	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	14.600.000.000,00	0,00	14.226.381.705,00	14.226.381.705,00	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	14.600.000.000,00	0,00	14.226.381.705,00	14.226.381.705,00	
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000,00	0,00	75.845.295,00	75.845.295,00	
4.1.1.06.04	Batu Kapur	0,00	0,00	395.880,00	395.880,00	
4.1.1.06.06	Batu Gunung/Kali	100.000.000,00	0,00	46.200.240,00	46.200.240,00	
4.1.1.06.07	Sirtu	0,00	0,00	9.268.545,00	9.268.545,00	
4.1.1.06.08	Pasir	20.000.000,00	0,00	13.561.940,00	13.561.940,00	
4.1.1.06.10	Batu Pecah/Kerikil	15.000.000,00	0,00	5.747.515,00	5.747.515,00	
4.1.1.06.33	Tanah Liat	0,00	0,00	515.625,00	515.625,00	
4.1.1.06.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	15.000.000,00	0,00	155.550,00	155.550,00	
4.1.1.07	Pajak Parkir	1.000.000.000,00	0,00	1.036.906.700,00	1.036.906.700,00	
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	1.000.000.000,00	0,00	1.036.906.700,00	1.036.906.700,00	
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	500.000.000,00	0,00	180.277.962,00	180.277.962,00	
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	500.000.000,00	0,00	180.277.962,00	180.277.962,00	
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.600.000.000,00	0,00	4.976.349.665,00	4.976.349.665,00	
4.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan	5.600.000.000,00	0,00	4.976.349.665,00	4.976.349.665,00	
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.000.000.000,00	0,00	6.299.976.840,00	6.299.976.840,00	
4.1.1.12.01	BPHTB - Pemindahan Hak	5.500.000.000,00	0,00	6.299.351.840,00	6.299.351.840,00	
4.1.1.12.02	BPHTB - Pemberian Hak Baru	500.000.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	84.050.000,00	0,00	14.571.861,00	14.571.861,00	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	84.050.000,00	0,00	14.571.861,00	14.571.861,00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	84.050.000,00	0,00	14.571.861,00	14.571.861,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.000.000.000,00	0,00	1.401.966.083,00	1.401.966.083,00	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD/BLUD	4.000.000.000,00	0,00	1.401.966.083,00	1.401.966.083,00	
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Bank Sulut	3.000.000.000,00	0,00	1.201.966.083,00	1.201.966.083,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pratomo By Simo

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBI
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	1.000.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.424.000.000,00	0,00	3.720.289.258,00	3.720.289.258,00	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.01.04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	2.624.000.000,00	0,00	2.752.454.860,00	2.752.454.860,00	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	2.624.000.000,00	0,00	2.752.426.446,00	2.752.426.446,00	
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	0,00	0,00	28.414,00	28.414,00	
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank SULUT	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.03.03	Rekening Deposito Pada Bank Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	200.000.000,00	0,00	290.861.787,00	290.861.787,00	
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	26.950.161,00	26.950.161,00	
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	11.698.040,00	11.698.040,00	
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	2.050.319,00	2.050.319,00	
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	0,00	5.168.161,00	5.168.161,00	
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	649.008,00	649.008,00	
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	0,00	0,00	473.304,00	473.304,00	
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	0,00	243.872.794,00	243.872.794,00	
4.1.4.07.13	Pendapatan Denda Pajak Daerah Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	950.000.000,00	0,00	676.972.611,00	676.972.611,00	
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	950.000.000,00	0,00	676.972.611,00	676.972.611,00	
4.1.4.24	Pendapatan Tunggakan Pajak	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.24.11	Pendapatan Tunggakan Pajak Lainnya	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
5	BELANJA	88.973.428.030,00	0,00	80.528.061.691,00	80.528.061.691,00	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	49.567.156.657,00	0,00	46.901.682.944,00	46.901.682.944,00	
5.1.1	Belanja Pegawai	49.567.156.657,00	0,00	46.901.682.944,00	46.901.682.944,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	15.075.627.617,00	0,00	12.839.227.759,00	12.839.227.759,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.416.019.671,00	0,00	3.154.003.960,00	3.154.003.960,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	318.162.086,00	0,00	278.974.268,00	278.974.268,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	244.463.750,00	0,00	198.195.388,00	198.195.388,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	150.660.750,00	0,00	138.490.000,00	138.490.000,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pratomo By Simo

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBI
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	219.211.004,00	0,00	187.495.380,00	187.495.380,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	73.603.815,00	0,00	21.603.252,00	21.603.252,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	56.541,00	0,00	47.850,00	47.850,00	
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	8.250.000.000,00	0,00	7.113.861.957,00	7.113.861.957,00	
5.1.1.01.21	Iuran Asuransi Kecelakaan	1.000.000.000,00	0,00	776.250.739,00	776.250.739,00	
5.1.1.01.22	Iuran Asuransi Kematian	1.403.450.000,00	0,00	970.304.965,00	970.304.965,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	32.336.116.615,00	0,00	32.223.486.435,00	32.223.486.435,00	
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	941.520.000,00	0,00	879.790.000,00	879.790.000,00	
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	31.394.596.615,00	0,00	31.343.696.435,00	31.343.696.435,00	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.780.283.243,00	0,00	1.621.250.000,00	1.621.250.000,00	
5.1.1.05.01	Blaya Pemungutan Pajak Daerah	1.780.283.243,00	0,00	1.621.250.000,00	1.621.250.000,00	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	375.129.182,00	0,00	217.718.750,00	217.718.750,00	
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	375.129.182,00	0,00	217.718.750,00	217.718.750,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	39.406.271.373,00	0,00	33.626.378.747,00	33.626.378.747,00	
5.2.1	Belanja Pegawai	11.459.151.000,00	0,00	10.573.420.000,00	10.573.420.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS	9.081.492.000,00	0,00	8.435.092.000,00	8.435.092.000,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.640.000,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	
5.2.1.01.04	Honorarium Piket Jaga	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
5.2.1.01.09	Honorarium Bendahara Dan Pembantu Bendahara	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
5.2.1.01.10	Honorarium Tim Verifikasi	865.200.000,00	0,00	752.800.000,00	752.800.000,00	
5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	6.014.670.000,00	0,00	5.726.310.000,00	5.726.310.000,00	
5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	724.082.000,00	0,00	687.532.000,00	687.532.000,00	
5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	984.300.000,00	0,00	840.620.000,00	840.620.000,00	
5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	445.600.000,00	0,00	383.950.000,00	383.950.000,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.135.400.000,00	0,00	898.250.000,00	898.250.000,00	
5.2.1.02.06	Honorarium Kepantiaian	9.000.000,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	
5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
5.2.1.02.11	Honorarium Bendahara Dan Pembantu Bendahara	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
5.2.1.02.12	Honorarium Tim Verifikasi	264.000.000,00	0,00	213.600.000,00	213.600.000,00	
5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	600.500.000,00	0,00	460.700.000,00	460.700.000,00	
5.2.1.02.17	Honorarium Tim Teknis	28.800.000,00	0,00	28.200.000,00	28.200.000,00	
5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	109.800.000,00	0,00	87.000.000,00	87.000.000,00	
5.2.1.02.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	93.300.000,00	0,00	76.300.000,00	76.300.000,00	
5.2.1.03	Uang Lembur	1.242.259.000,00	0,00	1.240.078.000,00	1.240.078.000,00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	926.849.000,00	0,00	924.728.000,00	924.728.000,00	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	910.000,00	0,00	906.000,00	906.000,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Printed By SisaDj

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBI
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.1.03.03	Lembur PPK SKPD	27.700.000,00	0,00	27.700.000,00	27.700.000,00	
5.2.1.03.04	Lembur Bendaharawan	286.800.000,00	0,00	286.744.000,00	286.744.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.259.671.462,00	0,00	21.295.470.247,00	21.295.470.247,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	602.170.646,00	0,00	376.685.612,00	376.685.612,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	203.586.950,00	0,00	167.925.660,00	167.925.660,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	43.000.000,00	0,00	39.467.950,00	39.467.950,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10.100.000,00	0,00	7.339.000,00	7.339.000,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	29.207.000,00	0,00	25.757.826,00	25.757.826,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.500.000,00	0,00	8.761.151,00	8.761.151,00	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perengkapan komputer	298.776.696,00	0,00	127.434.025,00	127.434.025,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	194.906.500,00	0,00	168.023.500,00	168.023.500,00	
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Logam / Non Logam	10.000.000,00	0,00	8.496.000,00	8.496.000,00	
5.2.2.02.12	Belanja Plagam, Plala, Cendramata, Hadiah	35.000.000,00	0,00	12.700.000,00	12.700.000,00	
5.2.2.02.21	Belanja Bahan Cetakn	149.906.500,00	0,00	146.827.500,00	146.827.500,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.581.991.265,00	0,00	12.844.981.239,00	12.844.981.239,00	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	0,00	944.998,00	944.998,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	8.000.000,00	0,00	6.263.700,00	6.263.700,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	306.356.774,00	0,00	280.989.928,00	280.989.928,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	62.000.000,00	0,00	27.065.000,00	27.065.000,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	149.540.000,00	0,00	125.772.773,00	125.772.773,00	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	0,00	254.140,00	254.140,00	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	35.000.000,00	0,00	14.888.000,00	14.888.000,00	
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	21.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	130.000.000,00	0,00	98.900.000,00	98.900.000,00	
5.2.2.03.18	Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan	173.000.000,00	0,00	48.746.200,00	48.746.200,00	
5.2.2.03.22	Belanja Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan	12.497.100.000,00	0,00	12.165.450.000,00	12.165.450.000,00	
5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Tim SIMDA	106.594.491,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.30	Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh	40.000.000,00	0,00	37.706.500,00	37.706.500,00	
5.2.2.03.33	Belanja Jasa Asistansi	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	189.750.000,00	0,00	89.229.706,00	89.229.706,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	65.250.000,00	0,00	30.919.400,00	30.919.400,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	49.000.000,00	0,00	19.055.000,00	19.055.000,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	67.000.000,00	0,00	36.532.006,00	36.532.006,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Printed By SisaDj

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBI
			€/d PERIOD LALU	PERIODE INI	TOTAL
5.2.1.03.03	Unit dan PPK 8000	37.700.000,00	0,00	37.700.000,00	37.700.000,00
5.2.1.03.04	Lembur Endaharawan	286.800.000,00	0,00	286.744.000,00	286.744.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.529.671.462,00	0,00	21.256.470.247,00	21.256.470.247,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Baku	632.130.000,00	0,00	375.005.601,00	306.000.512,00
5.2.2.01.01	Belanja Bahan Baku	333.000.000,00	0,00	167.805.600,00	167.805.600,00
5.2.2.01.03	Belanja Bahan Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai, Kawat)	43.000.000,00	0,00	33.467.950,00	39.467.950,00
5.2.2.01.04	Belanja Bahan Baku, Material dan Jasa Lainnya	10.100.000,00	0,00	7.220.000,00	7.220.000,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan dan Perlengkapan dan Bahan Pembersih	29.200.000,00	0,00	25.757.826,00	25.757.826,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Baku dan Jasa Lainnya	27.500.000,00	0,00	8.761.191,00	8.761.191,00
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Baku dan Perlengkapan Komputer	288.770.000,00	0,00	127.434.025,00	127.434.025,00
5.2.2.02	Belanja Bahan Material	194.900.000,00	0,00	168.023.500,00	168.023.500,00
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Logam / Non Logam	10.000.000,00	0,00	8.496.000,00	8.496.000,00
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Kayu, Simulasi Kayu, Plastik	11.000.000,00	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00
5.2.2.02.21	Belanja Bahan Cat dan Cat	140.900.000,00	0,00	145.827.500,00	146.827.500,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.381.991.265,00	0,00	12.844.981.239,00	12.844.981.239,00
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	0,00	944.598,00	944.598,00
5.2.2.03.02	Belanja Air	8.000.000,00	0,00	5.263.700,00	6.263.700,00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	336.392.774,00	0,00	263.900.928,00	280.900.928,00
5.2.2.03.05	Belanja Bahan Bakar/Mobil	52.000.000,00	0,00	27.065.000,00	27.065.000,00
5.2.2.03.06	Belanja Sewa/Fasilitas/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	140.540.000,00	0,00	125.772.773,00	125.772.773,00
5.2.2.03.07	Belanja Bahan/Perlengkapan	1.000.000,00	0,00	294.140,00	294.140,00
5.2.2.03.08	Belanja Sewa	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.03.10	Belanja Jasa Perawatan Kendaraan, Listrik, dan Lain-lain	25.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	21.000.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur, dan Lain-lain	140.000.000,00	0,00	95.900.000,00	95.900.000,00
5.2.2.03.18	Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan	123.000.000,00	0,00	43.746.000,00	43.746.000,00
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan Lain-lain	17.447.110.000,00	0,00	17.166.404.000,00	17.166.404.000,00
5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Kebersihan	20.000.000,00	0,00	23.000.000,00	20.000.000,00
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Tim SIMPA	136.544.444,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.03.30	Belanja Jasa Upah Manpower/Tenaga Bantu	40.000.000,00	0,00	37.706.500,00	37.706.500,00
5.2.2.03.35	Belanja Jasa Asuransi	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	189.790.000,00	0,00	83.229.000,00	83.229.000,00
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	55.250.000,00	0,00	53.019.400,00	53.019.400,00
5.2.2.05.02	Belanja Perawatan Suku Cadang	40.000.000,00	0,00	13.055.000,00	13.055.000,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Baku dan Lain-lain	14.000.000,00	0,00	13.522.000,00	13.522.000,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBI
			#/J PERKESID LALU	PERKESID INI	TOTAL
5.2.2.20.67	Belanja Mula di Terima Murni Murni	8.500.000,00	0,00	2.723.500,00	2.723.500,00
5.2.2.20.68	Belanja Cetak dan Penggandaan	536.397.127,00	0,00	907.039.510,00	567.036.510,00
5.2.2.20.69	Belanja Cetak	134.448.500,00	0,00	100.481.750,00	180.481.750,00
5.2.2.20.70	Belanja Penggandaan	253.945.600,00	0,00	365.056.260,00	365.056.260,00
5.2.2.20.71	Belanja Penggandaan	136.033.777,00	0,00	167.501.500,00	167.501.500,00
5.2.2.20.72	Belanja Sewa Kuda/Gedang/Gedang/Kotir	125.000.000,00	0,00	65.500.000,00	61.500.000,00
5.2.2.20.73	Belanja Sewa Kuda/Kuda/Kuda/Kuda	54.000.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.2.2.20.74	Belanja Sewa Ruang Rapat/Perkemahan	55.000.000,00	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00
5.2.2.20.75	Belanja Sewa Sarana Mob. Gas	120.000.000,00	0,00	68.750.000,00	68.750.000,00
5.2.2.20.76	Belanja Sewa Sarana Mob. Gas	120.000.000,00	0,00	68.750.000,00	68.750.000,00
5.2.2.20.77	Belanja Sewa Sarana Mob. Gas	900.000.000,00	0,00	612.251.291,00	612.251.291,00
5.2.2.20.78	Belanja Sewa Sarana Mob. Gas	180.000.000,00	0,00	172.105.957,00	172.105.957,00
5.2.2.20.79	Belanja Sewa Sarana Mob. Gas	180.000.000,00	0,00	165.002.903,00	165.002.903,00
5.2.2.20.80	Belanja Sewa Sarana Mob. Gas	130.000.000,00	0,00	205.675.015,00	205.675.015,00
5.2.2.20.81	Belanja Sewa Sarana Mob. Gas	332.711.502,00	0,00	273.569.416,00	273.569.416,00
5.2.2.20.82	Belanja Sewa Sarana Mob. Gas	10.000.000,00	0,00	9.860.000,00	9.860.000,00
5.2.2.20.83	Belanja Sewa Sarana Mob. Gas	10.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.20.84	Belanja Sewa Sarana Mob. Gas	80.000.000,00	0,00	78.915.000,00	78.915.000,00
5.2.2.20.85	Belanja Sewa Sarana Mob. Gas	80.000.000,00	0,00	78.915.000,00	78.915.000,00
5.2.2.20.86	Belanja Sewa Sarana Mob. Gas	4.553.611.565,00	0,00	4.258.321.019,00	4.258.321.019,00
5.2.2.20.87	Belanja Sewa Sarana Mob. Gas	2.121.250.000,00	0,00	1.996.726.000,00	1.996.726.000,00
5.2.2.20.88	Belanja Sewa Sarana Mob. Gas	2.432.361.565,00	0,00	2.253.601.019,00	2.253.601.019,00
5.2.2.20.89	Belanja Sewa Sarana Mob. Gas	1.540.746.331,00	0,00	1.223.733.870,00	1.223.733.870,00
5.2.2.20.90	Belanja Sewa Sarana Mob. Gas	150.000.000,00	0,00	99.416.900,00	99.416.900,00
5.2.2.20.91	Belanja Sewa Sarana Mob. Gas	1.330.746.331,00	0,00	1.174.316.970,00	1.174.316.970,00
5.2.2.20.92	Belanja Sewa Sarana Mob. Gas	941.961.500,00	0,00	744.578.500,00	744.578.500,00
5.2.2.20.93	Belanja Sewa Sarana Mob. Gas	536.761.500,00	0,00	373.610.600,00	373.610.600,00
5.2.2.20.94	Belanja Sewa Sarana Mob. Gas	226.000.000,00	0,00	204.002.900,00	204.002.900,00
5.2.2.20.95	Belanja Sewa Sarana Mob. Gas	70.200.000,00	0,00	70.166.000,00	70.166.000,00
5.2.2.20.96	Belanja Sewa Sarana Mob. Gas	59.500.000,00	0,00	59.500.000,00	59.500.000,00
5.2.2.20.97	Belanja Sewa Sarana Mob. Gas	40.500.000,00	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00
5.2.2.20.98	Belanja Sewa Sarana Mob. Gas	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.2.2.20.99	Belanja Sewa Sarana Mob. Gas	4.427.446.311,00	0,00	1.757.488.300,00	1.757.488.300,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBI
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.465.198.911,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	2.465.198.911,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	448.000.000,00	0,00	434.030.000,00	434.030.000,00	
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	448.000.000,00	0,00	434.030.000,00	434.030.000,00	
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	29.600.000,00	0,00	29.500.000,00	29.500.000,00	
5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	29.600.000,00	0,00	29.500.000,00	29.500.000,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	41.150.000,00	0,00	11.583.500,00	11.583.500,00	
5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	3.900.000,00	0,00	333.500,00	333.500,00	
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	11.500.000,00	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	25.750.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	288.000.000,00	0,00	240.600.000,00	240.600.000,00	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	211.000.000,00	0,00	176.600.000,00	176.600.000,00	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	60.000.000,00	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.125.000.000,00	0,00	1.026.775.000,00	1.026.775.000,00	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	417.000.000,00	0,00	372.400.000,00	372.400.000,00	
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	468.000.000,00	0,00	417.375.000,00	417.375.000,00	
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	240.000.000,00	0,00	237.000.000,00	237.000.000,00	
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapot Pejabat	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	17.500.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	17.500.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Printed By: Simanungkalit

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBI
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena	0,00	0,00	0,00	0,00	
SURPLUS / DEFISIT		(33.615.378.030,00)	0,00	(29.714.573.274,00)	(29.714.573.274,00)	
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		(33.615.378.030,00)	0,00	(29.714.573.274,00)	(29.714.573.274,00)	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Printed By: Simanungkalit



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017

Urusan Pemerintahan		: 4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	
Unit Organisasi		: 4.04 - 4.04.05	BADAN KEUANGAN	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBI
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	67.053.945.507,00	0,00	65.176.593.708,00	65.176.593.708,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	67.053.945.507,00	0,00	65.176.593.708,00	65.176.593.708,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	60.721.671.497,00	0,00	60.657.343.915,00	60.657.343.915,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	7.500.000.000,00	0,00	7.563.931.990,00	7.563.931.990,00	
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	3.500.000.000,00	0,00	3.619.631.944,00	3.619.631.944,00	
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	0,00	0,00	115.314.865,00	115.314.865,00	
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	500.000.000,00	0,00	159.992.878,00	159.992.878,00	
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	800.000.000,00	0,00	1.485.586.533,00	1.485.586.533,00	
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	1.670.000.000,00	0,00	1.220.494.773,00	1.220.494.773,00	
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	30.000.000,00	0,00	90.616.357,00	90.616.357,00	
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	1.000.000.000,00	0,00	325.524.690,00	325.524.690,00	
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	0,00	0,00	546.769.950,00	546.769.950,00	
4.1.1.02	Pajak Restoran	10.500.000.000,00	0,00	10.684.603.616,00	10.684.603.616,00	
4.1.1.02.01	Restoran	5.500.000.000,00	0,00	5.883.252.248,00	5.883.252.248,00	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	4.000.000.000,00	0,00	4.277.117.068,00	4.277.117.068,00	
4.1.1.02.03	Café	950.000.000,00	0,00	456.181.410,00	456.181.410,00	
4.1.1.02.05	Katering	50.000.000,00	0,00	68.052.890,00	68.052.890,00	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	3.250.000.000,00	0,00	2.951.625.751,00	2.951.625.751,00	
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	1.650.000.000,00	0,00	1.995.351.362,00	1.995.351.362,00	
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0,00	0,00	5.375.000,00	5.375.000,00	
4.1.1.03.07	Karaoke	600.000.000,00	0,00	340.949.984,00	340.949.984,00	
4.1.1.03.08	Klub Malam	35.000.000,00	0,00	18.779.265,00	18.779.265,00	
4.1.1.03.10	Permainan Billar	35.000.000,00	0,00	12.136.176,00	12.136.176,00	
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	900.000.000,00	0,00	526.413.309,00	526.413.309,00	
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	10.000.000,00	0,00	8.413.500,00	8.413.500,00	
4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	20.000.000,00	0,00	23.170.855,00	23.170.855,00	
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	0,00	0,00	15.036.300,00	15.036.300,00	
4.1.1.03.21	Pajak kegiatan hiburan lainnya	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
4.1.1.04	Pajak Reklame	1.800.000.000,00	0,00	1.616.083.574,00	1.616.083.574,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Printed By Sp4Ud

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBI
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	1.188.000.000,00	0,00	1.505.896.467,00	1.505.896.467,00	
4.1.1.04.02	Reklame Kain	450.000.000,00	0,00	91.453.247,00	91.453.247,00	
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Soker	75.000.000,00	0,00	9.808.335,00	9.808.335,00	
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	75.000.000,00	0,00	6.924.750,00	6.924.750,00	
4.1.1.04.09	Reklame Film/Slide	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.11	Reklame Lainnya	10.000.000,00	0,00	2.000.775,00	2.000.775,00	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	16.600.000.000,00	0,00	16.553.779.808,00	16.553.779.808,00	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	16.600.000.000,00	0,00	16.553.779.808,00	16.553.779.808,00	
4.1.1.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.000.000,00	0,00	22.919.335,00	22.919.335,00	
4.1.1.06.01	Asbes	0,00	0,00	2.283.501,00	2.283.501,00	
4.1.1.06.04	Batu Kapur	0,00	0,00	529.375,00	529.375,00	
4.1.1.06.06	Batu Gunung/Kali	5.000.000,00	0,00	4.980.514,00	4.980.514,00	
4.1.1.06.07	Sirtu	0,00	0,00	1.723.513,00	1.723.513,00	
4.1.1.06.08	Pasir	10.000.000,00	0,00	4.567.509,00	4.567.509,00	
4.1.1.06.10	Batu Pecah/Kerikil	5.000.000,00	0,00	7.352.092,00	7.352.092,00	
4.1.1.06.33	Tanah Liat	0,00	0,00	1.429.281,00	1.429.281,00	
4.1.1.06.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	5.000.000,00	0,00	53.550,00	53.550,00	
4.1.1.07	Pajak Parkir	1.750.000.000,00	0,00	1.376.884.900,00	1.376.884.900,00	
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	1.750.000.000,00	0,00	1.376.884.900,00	1.376.884.900,00	
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	250.000.000,00	0,00	131.468.166,00	131.468.166,00	
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	250.000.000,00	0,00	131.468.166,00	131.468.166,00	
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.000.000.000,00	0,00	5.586.128.760,00	5.586.128.760,00	
4.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan	7.000.000.000,00	0,00	5.586.128.760,00	5.586.128.760,00	
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12.046.671.497,00	0,00	14.169.918.015,00	14.169.918.015,00	
4.1.1.12.01	BPHTB - Pemindahan Hak	8.500.000.000,00	0,00	14.169.918.015,00	14.169.918.015,00	
4.1.1.12.02	BPHTB - Pemberian Hak Baru	3.546.671.497,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	119.050.000,00	0,00	8.526.400,00	8.526.400,00	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	119.050.000,00	0,00	8.526.400,00	8.526.400,00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	119.050.000,00	0,00	8.276.400,00	8.276.400,00	
4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.585.636.510,00	0,00	1.585.636.510,00	1.585.636.510,00	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD/BLUD)	2.585.636.510,00	0,00	1.585.636.510,00	1.585.636.510,00	
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Bank Solut	2.585.636.510,00	0,00	1.585.636.510,00	1.585.636.510,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Printed By Sp4Ud

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBI
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.627.587.500,00	0,00	2.925.086.883,00	2.925.086.883,00	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	2.865.658.997,00	0,00	2.149.733.573,00	2.149.733.573,00	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	2.865.658.997,00	0,00	2.149.521.149,00	2.149.521.149,00	
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	0,00	0,00	212.424,00	212.424,00	
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	300.000.000,00	0,00	369.075.547,00	369.075.547,00	
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	43.031.084,00	43.031.084,00	
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	35.249.082,00	35.249.082,00	
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	4.946.994,00	4.946.994,00	
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	0,00	7.756.833,00	7.756.833,00	
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	4.966.074,00	4.966.074,00	
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	0,00	0,00	744.538,00	744.538,00	
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	0,00	271.860.452,00	271.860.452,00	
4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	520.490,00	520.490,00	
4.1.4.07.13	Pendapatan Denda Pajak Daerah Lainnya	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	0,00	4.517.600,00	4.517.600,00	
4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	0,00	0,00	4.517.600,00	4.517.600,00	
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	300.000.000,00	0,00	401.760.163,00	401.760.163,00	
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	300.000.000,00	0,00	401.760.163,00	401.760.163,00	
4.1.4.24	Pendapatan Tunggalan Pajak	111.928.503,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.24.11	Pendapatan Tunggalan Pajak Lainnya	111.928.503,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	(1.098.409,00)	(1.098.409,00)	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	0,00	0,00	(1.098.409,00)	(1.098.409,00)	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	(1.102.534,00)	(1.102.534,00)	
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00	
4.3.11	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	1.098.409,00	1.098.409,00	
4.3.11.11	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	1.098.409,00	1.098.409,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DARI BELAJAR DAERAH

Printed By Sindo

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBI
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.3.11.11.01	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	1.098.409,00	1.098.409,00	
5	BELANJA	88.542.695.431,00	0,00	80.479.659.173,00	80.479.659.173,00	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	47.431.155.561,00	0,00	46.157.237.000,00	46.157.237.000,00	
5.1.1	Belanja Pegawai	47.431.155.561,00	0,00	43.714.784.400,00	43.714.784.400,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	12.939.626.521,00	0,00	10.521.406.713,00	10.521.406.713,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.665.319.671,00	0,00	3.583.999.100,00	3.583.999.100,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	318.162.086,00	0,00	296.805.434,00	296.805.434,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	244.463.750,00	0,00	232.225.000,00	232.225.000,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	150.660.750,00	0,00	145.592.000,00	145.592.000,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Bersas	219.211.004,00	0,00	199.589.520,00	199.589.520,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	73.603.815,00	0,00	5.721.847,00	5.721.847,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	56.541,00	0,00	52.811,00	52.811,00	
5.1.1.01.09	Juran Asuransi Kesehatan	8.250.000.000,00	0,00	6.040.910.834,00	6.040.910.834,00	
5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	8.066.135,00	0,00	7.337.812,00	7.337.812,00	
5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	10.082.769,00	0,00	9.172.355,00	9.172.355,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	32.336.116.615,00	0,00	31.154.765.105,00	31.154.765.105,00	
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	941.520.000,00	0,00	855.560.000,00	855.560.000,00	
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	31.394.596.615,00	0,00	30.299.205.105,00	30.299.205.105,00	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.780.283.243,00	0,00	1.777.855.809,00	1.777.855.809,00	
5.1.1.05.01	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	1.780.283.243,00	0,00	1.777.855.809,00	1.777.855.809,00	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	375.129.182,00	0,00	260.756.773,00	260.756.773,00	
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	375.129.182,00	0,00	260.756.773,00	260.756.773,00	
5.1.4	Belanja Hibah	0,00	0,00	2.442.452.600,00	2.442.452.600,00	
5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	0,00	0,00	2.442.452.600,00	2.442.452.600,00	
5.1.4.06.01	Kelompok masyarakat bidang perekonomian	0,00	0,00	2.442.452.600,00	2.442.452.600,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	41.111.539.870,00	0,00	34.322.422.173,00	34.322.422.173,00	
5.2.1	Belanja Pegawai	12.566.450.000,00	0,00	12.048.718.000,00	12.048.718.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS	10.117.590.000,00	0,00	9.868.150.000,00	9.868.150.000,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	34.390.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.04	Honorarium Piket Jaga	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
5.2.1.01.09	Honorarium Bendahara Dan Pembantu Bendahara	1.044.600.000,00	0,00	1.044.000.000,00	1.044.000.000,00	
5.2.1.01.10	Honorarium Tim Verifikasi	655.800.000,00	0,00	634.800.000,00	634.800.000,00	
5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	5.653.400.000,00	0,00	5.608.000.000,00	5.608.000.000,00	
5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	1.123.200.000,00	0,00	1.064.750.000,00	1.064.750.000,00	
5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	1.052.600.000,00	0,00	971.550.000,00	971.550.000,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DARI BELAJAR DAERAH

Printed By Sindo

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBI
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	529.600.000,00	0,00	521.050.000,00	521.050.000,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.358.050.000,00	0,00	1.210.690.000,00	1.210.690.000,00	
5.2.1.02.06	Honorarium Kapitan/taim	9.000.000,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	
5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	27.000.000,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	
5.2.1.02.11	Honorarium Bendahara Dan Pembantu Bendahara	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
5.2.1.02.12	Honorarium Tim Verifikasi	200.400.000,00	0,00	198.800.000,00	198.800.000,00	
5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	508.250.000,00	0,00	482.250.000,00	482.250.000,00	
5.2.1.02.17	Honorarium Tim Teknis	270.000.000,00	0,00	206.490.000,00	206.490.000,00	
5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	219.600.000,00	0,00	178.900.000,00	178.900.000,00	
5.2.1.02.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	117.800.000,00	0,00	114.400.000,00	114.400.000,00	
5.2.1.03	Uang Lembur	1.090.810.000,00	0,00	969.878.000,00	969.878.000,00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.090.810.000,00	0,00	969.878.000,00	969.878.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.080.217.462,00	0,00	20.838.242.307,00	20.838.242.307,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	627.715.756,00	0,00	443.684.874,00	443.684.874,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	268.495.700,00	0,00	221.583.756,00	221.583.756,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	53.000.000,00	0,00	50.726.200,00	50.726.200,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materi Dan Benda Pos Lainnya	13.600.000,00	0,00	8.706.000,00	8.706.000,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	23.500.000,00	0,00	9.729.418,00	9.729.418,00	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perengkapan komputer	269.120.056,00	0,00	152.939.500,00	152.939.500,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	385.000.000,00	0,00	291.474.817,00	291.474.817,00	
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Logam / Non Logam	20.000.000,00	0,00	591.000,00	591.000,00	
5.2.2.02.12	Belanja Plagam, Plak, Cendramata, Hadiah	130.000.000,00	0,00	73.440.817,00	73.440.817,00	
5.2.2.02.21	Belanja Bahan Cetakan	235.000.000,00	0,00	217.443.000,00	217.443.000,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.867.600.477,00	0,00	13.431.622.167,00	13.431.622.167,00	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.900.000,00	0,00	999.808,00	999.808,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	10.000.000,00	0,00	7.011.000,00	7.011.000,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	315.393.477,00	0,00	301.899.112,00	301.899.112,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	53.460.000,00	0,00	35.229.000,00	35.229.000,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	241.712.000,00	0,00	161.712.000,00	161.712.000,00	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	700.000,00	0,00	627.490,00	627.490,00	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.13	Belanja pembelian spanduk, umbul-umbul, Bendera	30.000.000,00	0,00	17.407.000,00	17.407.000,00	
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	101.480.000,00	0,00	101.163.415,00	101.163.415,00	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Konsultan Standar Operasional Prosedur (SOP)	40.000.000,00	0,00	37.716.500,00	37.716.500,00	
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	203.000.000,00	0,00	192.190.000,00	192.190.000,00	
5.2.2.03.18	Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan	119.450.000,00	0,00	55.124.840,00	55.124.840,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGADAAN DAN BELANJA DAERAH

Printed By: Simba



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018

Urusan Pemerintahan		: 4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	
Unit Organisasi		: 4.04 - 4.04.05	BADAN KEUANGAN	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBI
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	76.691.561.214,00	0,00	67.206.836.233,00	67.206.836.233,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	76.691.561.214,00	0,00	67.102.488.100,00	67.102.488.100,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	70.000.000.000,00	0,00	61.771.957.483,00	61.771.957.483,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	8.000.000.000,00	0,00	8.164.430.600,00	8.164.430.600,00	
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	4.000.000.000,00	0,00	2.792.469.583,00	2.792.469.583,00	
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	500.000.000,00	0,00	343.857.928,00	343.857.928,00	
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	800.000.000,00	0,00	1.777.893.411,00	1.777.893.411,00	
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	1.670.000.000,00	0,00	2.341.466.930,00	2.341.466.930,00	
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	30.000.000,00	0,00	32.963.141,00	32.963.141,00	
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	1.000.000.000,00	0,00	257.492.210,00	257.492.210,00	
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	0,00	0,00	618.287.397,00	618.287.397,00	
4.1.1.02	Pajak Restoran	11.800.000.000,00	0,00	12.258.816.541,00	12.258.816.541,00	
4.1.1.02.01	Restoran	5.500.000.000,00	0,00	4.020.322.773,00	4.020.322.773,00	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	5.300.000.000,00	0,00	8.123.350.609,00	8.123.350.609,00	
4.1.1.02.03	Café	950.000.000,00	0,00	101.246.759,00	101.246.759,00	
4.1.1.02.05	Katering	50.000.000,00	0,00	13.896.400,00	13.896.400,00	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	3.500.000.000,00	0,00	3.026.970.606,00	3.026.970.606,00	
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	1.700.000.000,00	0,00	1.899.462.255,00	1.899.462.255,00	
4.1.1.03.03	Kontes Kecantikan	0,00	0,00	8.218.116,00	8.218.116,00	
4.1.1.03.04	Kontes Binaraga	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	
4.1.1.03.07	Karaoke	1.000.000.000,00	0,00	453.349.112,00	453.349.112,00	
4.1.1.03.08	Klub Malam	35.000.000,00	0,00	28.662.864,00	28.662.864,00	
4.1.1.03.10	Permainan Billar	35.000.000,00	0,00	3.275.284,00	3.275.284,00	
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	700.000.000,00	0,00	553.379.973,00	553.379.973,00	
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	10.000.000,00	0,00	7.134.500,00	7.134.500,00	
4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	20.000.000,00	0,00	30.643.837,00	30.643.837,00	
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	0,00	0,00	36.813.165,00	36.813.165,00	
4.1.1.03.21	Pajak kegiatan hiburan lainnya	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
4.1.1.04	Pajak Reklame	2.000.000.000,00	0,00	1.544.922.033,00	1.544.922.033,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
Periode: 01 Sep 04					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Printed By Simba

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBI
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	1.188.000.000,00	0,00	1.542.047.770,00	1.542.047.770,00	
4.1.1.04.02	Reklame Kain	550.000.000,00	0,00	1.175.388,00	1.175.388,00	
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	75.000.000,00	0,00	669.875,00	669.875,00	
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	175.000.000,00	0,00	1.029.000,00	1.029.000,00	
4.1.1.04.09	Reklame Film/Slide	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.11	Reklame Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	22.000.000.000,00	0,00	18.068.340.650,00	18.068.340.650,00	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	22.000.000.000,00	0,00	18.068.340.650,00	18.068.340.650,00	
4.1.1.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.000.000,00	0,00	5.298.502,00	5.298.502,00	
4.1.1.06.01	Asbes	0,00	0,00	299.800,00	299.800,00	
4.1.1.06.06	Batu Gunung/Kali	10.000.000,00	0,00	69.621,00	69.621,00	
4.1.1.06.07	Sirtu	0,00	0,00	40.886,00	40.886,00	
4.1.1.06.08	Pasir	20.000.000,00	0,00	513.582,00	513.582,00	
4.1.1.06.10	Batu Pecah/Kerikil	10.000.000,00	0,00	323.288,00	323.288,00	
4.1.1.06.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	10.000.000,00	0,00	4.051.325,00	4.051.325,00	
4.1.1.07	Pajak Parkir	3.000.000.000,00	0,00	1.218.953.906,00	1.218.953.906,00	
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	3.000.000.000,00	0,00	1.218.953.906,00	1.218.953.906,00	
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	200.000.000,00	0,00	134.394.747,00	134.394.747,00	
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	200.000.000,00	0,00	134.394.747,00	134.394.747,00	
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.250.000.000,00	0,00	5.889.667.797,00	5.889.667.797,00	
4.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan	7.250.000.000,00	0,00	5.889.667.797,00	5.889.667.797,00	
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12.000.000.000,00	0,00	11.460.162.101,00	11.460.162.101,00	
4.1.1.12.01	BPHTB - Pemindahan Hak	9.000.000.000,00	0,00	10.945.508.139,00	10.945.508.139,00	
4.1.1.12.02	BPHTB - Pemberian Hak Baru	3.000.000.000,00	0,00	514.653.962,00	514.653.962,00	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	45.000.000,00	0,00	11.544.756,00	11.544.756,00	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	45.000.000,00	0,00	11.544.756,00	11.544.756,00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	45.000.000,00	0,00	11.544.756,00	11.544.756,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.486.911.214,00	0,00	2.486.911.214,00	2.486.911.214,00	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD/BLUD)	2.486.911.214,00	0,00	2.486.911.214,00	2.486.911.214,00	
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Bank Solut	2.486.911.214,00	0,00	2.486.911.214,00	2.486.911.214,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Printed By Simba

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBI
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.159.650.000,00	0,00	2.832.074.647,00	2.832.074.647,00	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	3.259.650.000,00	0,00	2.048.856.075,00	2.048.856.075,00	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	3.259.650.000,00	0,00	2.045.716.815,00	2.045.716.815,00	
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	0,00	0,00	3.139.260,00	3.139.260,00	
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	350.000.000,00	0,00	458.746.372,00	458.746.372,00	
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	36.928.759,00	36.928.759,00	
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	43.107.561,00	43.107.561,00	
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	13.220.502,00	13.220.502,00	
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	0,00	14.378.191,00	14.378.191,00	
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	925.250,00	925.250,00	
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	0,00	0,00	1.196.145,00	1.196.145,00	
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	0,00	348.989.964,00	348.989.964,00	
4.1.4.07.13	Pendapatan Denda Pajak Daerah Lainnya	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	500.000.000,00	0,00	324.222.200,00	324.222.200,00	
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	500.000.000,00	0,00	324.222.200,00	324.222.200,00	
4.1.4.24	Pendapatan Tunggakan Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.24.11	Pendapatan Tunggakan Pajak Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	104.348.133,00	104.348.133,00	
4.3.11	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	104.348.133,00	104.348.133,00	
4.3.11.11	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	104.348.133,00	104.348.133,00	
4.3.11.11.01	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	104.348.133,00	104.348.133,00	
5	BELANJA	82.922.530.702,64	0,00	78.212.311.751,00	78.212.311.751,00	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	40.336.738.595,64	0,00	39.695.230.105,00	39.695.230.105,00	
5.1.1	Belanja Pegawai	40.336.738.595,64	0,00	39.695.230.105,00	39.695.230.105,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.211.209.555,64	0,00	4.950.098.831,00	4.950.098.831,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.553.682.164,64	0,00	3.502.280.800,00	3.502.280.800,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	348.162.086,00	0,00	322.412.640,00	322.412.640,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pratomo Sudo

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBI
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	237.129.838,00	0,00	226.490.000,00	226.490.000,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	160.660.750,00	0,00	155.040.000,00	155.040.000,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	219.211.004,00	0,00	197.706.600,00	197.706.600,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	73.603.815,00	0,00	5.506.656,00	5.506.656,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	106.541,00	0,00	51.793,00	51.793,00	
5.1.1.01.09	Juran Asuransi Kesehatan	136.504.453,00	0,00	128.095.201,00	128.095.201,00	
5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	10.066.135,00	0,00	7.194.714,00	7.194.714,00	
5.1.1.01.22	Jaminan Kematian (JKM)	472.082.769,00	0,00	405.320.427,00	405.320.427,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	31.370.116.615,00	0,00	31.282.562.854,00	31.282.562.854,00	
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	941.520.000,00	0,00	869.952.500,00	869.952.500,00	
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	30.428.596.615,00	0,00	30.412.610.354,00	30.412.610.354,00	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.380.283.243,00	0,00	3.331.862.492,00	3.331.862.492,00	
5.1.1.05.01	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	3.380.283.243,00	0,00	3.331.862.492,00	3.331.862.492,00	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	375.129.182,00	0,00	130.705.928,00	130.705.928,00	
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	375.129.182,00	0,00	130.705.928,00	130.705.928,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	42.585.792.107,00	0,00	38.517.081.646,00	38.517.081.646,00	
5.2.1	Belanja Pegawai	13.579.220.000,00	0,00	12.546.799.500,00	12.546.799.500,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS	11.286.970.000,00	0,00	10.391.452.500,00	10.391.452.500,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.350.000,00	0,00	940.000,00	940.000,00	
5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	
5.2.1.01.04	Honorarium Picket Jaga	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
5.2.1.01.09	Honorarium Bendahara Dan Pembantu Bendahara	1.044.600.000,00	0,00	1.006.200.000,00	1.006.200.000,00	
5.2.1.01.10	Honorarium Tim Verifikasi	693.250.000,00	0,00	673.900.000,00	673.900.000,00	
5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	5.635.620.000,00	0,00	5.295.525.000,00	5.295.525.000,00	
5.2.1.01.14	Honorarium Pengelola Data	1.634.000.000,00	0,00	1.485.900.000,00	1.485.900.000,00	
5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	1.686.750.000,00	0,00	1.420.967.500,00	1.420.967.500,00	
5.2.1.01.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	565.650.000,00	0,00	483.250.000,00	483.250.000,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.459.150.000,00	0,00	1.322.250.000,00	1.322.250.000,00	
5.2.1.02.06	Honorarium Kepanitiaan	9.000.000,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	
5.2.1.02.10	Honorarium Sopir	32.400.000,00	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	
5.2.1.02.11	Honorarium Bendahara Dan Pembantu Bendahara	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
5.2.1.02.12	Honorarium Tim Verifikasi	242.100.000,00	0,00	242.100.000,00	242.100.000,00	
5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	510.900.000,00	0,00	468.900.000,00	468.900.000,00	
5.2.1.02.17	Honorarium Tim Teknis	214.750.000,00	0,00	143.000.000,00	143.000.000,00	
5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Data	305.600.000,00	0,00	305.600.000,00	305.600.000,00	
5.2.1.02.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	138.400.000,00	0,00	126.900.000,00	126.900.000,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pratomo Sudo

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBI
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.1.03	Uang Lembur	833.100.000,00	0,00	833.097.000,00	833.097.000,00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	833.100.000,00	0,00	833.097.000,00	833.097.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.410.397.107,00	0,00	24.505.474.326,00	24.505.474.326,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	709.920.025,00	0,00	447.063.893,00	447.063.893,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	253.181.601,00	0,00	227.156.631,00	227.156.631,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	195.000.000,00	0,00	42.685.350,00	42.685.350,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	13.608.000,00	0,00	11.095.000,00	11.095.000,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35.000.000,00	0,00	15.441.172,00	15.441.172,00	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis Perifengkap komputer	213.130.424,00	0,00	150.685.740,00	150.685.740,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	552.300.000,00	0,00	376.409.979,00	376.409.979,00	
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Logam / Non Logam	20.000.000,00	0,00	2.599.500,00	2.599.500,00	
5.2.2.02.12	Belanja Plogam, Pila, Condramata, Hadiah	275.000.000,00	0,00	193.292.479,00	193.292.479,00	
5.2.2.02.21	Belanja Bahan Cetaklan	257.300.000,00	0,00	180.518.000,00	180.518.000,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.603.069.851,00	0,00	13.742.410.357,00	13.742.410.357,00	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	72.400.000,00	0,00	13.776.493,00	13.776.493,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	7.800.000,00	0,00	7.609.900,00	7.609.900,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	347.800.000,00	0,00	278.751.856,00	278.751.856,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	99.880.000,00	0,00	55.880.000,00	55.880.000,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	393.540.000,00	0,00	340.811.435,00	340.811.435,00	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	700.000,00	0,00	657.800,00	657.800,00	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	57.000.000,00	0,00	20.185.122,00	20.185.122,00	
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	95.000.000,00	0,00	94.949.751,00	94.949.751,00	
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	285.450.000,00	0,00	194.250.000,00	194.250.000,00	
5.2.2.03.18	Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan	331.250.000,00	0,00	291.950.000,00	291.950.000,00	
5.2.2.03.22	Belanja Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan	12.559.050.000,00	0,00	12.303.900.000,00	12.303.900.000,00	
5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Keamanan	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Sistem Informasi Keuangan Daerah	146.199.851,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.28	Belanja Jasa Tim Pemeriksaan Eksternal	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.30	Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh	90.000.000,00	0,00	32.913.000,00	32.913.000,00	
5.2.2.03.34	Belanja Jasa Pihak Ketiga	35.000.000,00	0,00	34.775.000,00	34.775.000,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	243.000.000,00	0,00	81.821.362,00	81.821.362,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	105.250.000,00	0,00	18.042.800,00	18.042.800,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	31.000.000,00	0,00	5.524.091,00	5.524.091,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	97.500.000,00	0,00	50.260.471,00	50.260.471,00	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.250.000,00	0,00	7.994.000,00	7.994.000,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DAERAH

Printed by Simba



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019

Urusan Pemerintahan		: 4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan			
Unit Organisasi		: 4.04 - 4.04.05	BADAN KEUANGAN			
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH DARI 100 PERSEN
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	83.537.542.689,00	0,00	75.540.217.467,00	75.540.217.467,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	83.537.542.689,00	0,00	74.857.417.467,00	74.857.417.467,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	75.000.000.000,00	0,00	67.475.359.049,00	67.475.359.049,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	9.000.000.000,00	0,00	9.530.340.261,00	9.530.340.261,00	
4.1.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	7.000.000.000,00	0,00	3.770.095.180,00	3.770.095.180,00	
4.1.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	0,00	0,00	54.013.888,00	54.013.888,00	
4.1.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	800.000.000,00	0,00	1.847.891.710,00	1.847.891.710,00	
4.1.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	470.000.000,00	0,00	2.034.469.207,00	2.034.469.207,00	
4.1.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	30.000.000,00	0,00	27.501.982,00	27.501.982,00	
4.1.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	200.000.000,00	0,00	87.371.124,00	87.371.124,00	
4.1.1.1.01.11	Pajak Hotel / Cottage	0,00	0,00	973.457.231,00	973.457.231,00	
4.1.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	0,00	0,00	727.168.139,00	727.168.139,00	
4.1.1.1.01.17	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	0,00	8.371.800,00	8.371.800,00	
4.1.1.1.02	Pajak Restoran	13.000.000.000,00	0,00	15.079.063.321,00	15.079.063.321,00	
4.1.1.1.02.01	Restoran	7.300.000.000,00	0,00	8.501.841.601,00	8.501.841.601,00	
4.1.1.1.02.02	Rumah Makan	4.700.000.000,00	0,00	5.950.642.248,00	5.950.642.248,00	
4.1.1.1.02.03	Café	750.000.000,00	0,00	598.130.922,00	598.130.922,00	
4.1.1.1.02.04	Kantin	0,00	0,00	8.139.200,00	8.139.200,00	
4.1.1.1.02.05	Katering	250.000.000,00	0,00	19.918.600,00	19.918.600,00	
4.1.1.1.02.06	Warung	0,00	0,00	390.750,00	390.750,00	
4.1.1.1.03	Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	0,00	3.315.288.677,00	3.315.288.677,00	
4.1.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	1.500.000.000,00	0,00	2.050.314.163,00	2.050.314.163,00	
4.1.1.1.03.03	Kontes Kecantikan	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	
4.1.1.1.03.07	Karaoke	700.000.000,00	0,00	176.096.680,00	176.096.680,00	
4.1.1.1.03.08	Klub Malam	35.000.000,00	0,00	14.664.007,00	14.664.007,00	
4.1.1.1.03.10	Permainan Billar	35.000.000,00	0,00	3.975.768,00	3.975.768,00	
4.1.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	700.000.000,00	0,00	588.258.150,00	588.258.150,00	
4.1.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	10.000.000,00	0,00	12.736.875,00	12.736.875,00	
4.1.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	20.000.000,00	0,00	69.238.889,00	69.238.889,00	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH						

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

trah:4 By Sa:0d

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBI
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	0,00	0,00	39.900.242,00	39.900.242,00	
4.1.1.03.21	Pajak kegiatan hiburan lainnya	0,00	0,00	359.898.903,00	359.898.903,00	
4.1.1.04	Pajak Reklame	2.000.000.000,00	0,00	1.324.203.007,00	1.324.203.007,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	1.188.000.000,00	0,00	1.320.441.432,00	1.320.441.432,00	
4.1.1.04.02	Reklame Kain	550.000.000,00	0,00	1.741.783,00	1.741.783,00	
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.09	Reklame Film/Slide	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.11	Reklame Lainnya	10.000.000,00	0,00	2.019.792,00	2.019.792,00	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	24.500.000.000,00	0,00	18.883.411.606,00	18.883.411.606,00	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	24.500.000.000,00	0,00	18.883.411.606,00	18.883.411.606,00	
4.1.1.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.000.000,00	0,00	13.576.465,00	13.576.465,00	
4.1.1.06.01	Asbes	0,00	0,00	56.225,00	56.225,00	
4.1.1.06.06	Batu Gunung/Kali	10.000.000,00	0,00	12.158.190,00	12.158.190,00	
4.1.1.06.08	Pasir	20.000.000,00	0,00	607.600,00	607.600,00	
4.1.1.06.10	Batu Pecah/Kerikil	10.000.000,00	0,00	238.825,00	238.825,00	
4.1.1.06.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	10.000.000,00	0,00	515.625,00	515.625,00	
4.1.1.07	Pajak Parkir	2.600.000.000,00	0,00	2.510.409.636,00	2.510.409.636,00	
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	2.600.000.000,00	0,00	2.510.409.636,00	2.510.409.636,00	
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	100.000.000,00	0,00	111.770.902,00	111.770.902,00	
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	100.000.000,00	0,00	111.770.902,00	111.770.902,00	
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.250.000.000,00	0,00	6.915.228.914,00	6.915.228.914,00	
4.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan	8.250.000.000,00	0,00	6.915.228.914,00	6.915.228.914,00	
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12.500.000.000,00	0,00	9.792.066.260,00	9.792.066.260,00	
4.1.1.12.01	BPHTB - Pemindahan Hak	11.500.000.000,00	0,00	9.536.593.410,00	9.536.593.410,00	
4.1.1.12.02	BPHTB - Pemberian Hak Baru	1.000.000.000,00	0,00	255.472.850,00	255.472.850,00	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	269.050.000,00	0,00	100.865.913,00	100.865.913,00	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	269.050.000,00	0,00	100.865.913,00	100.865.913,00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	269.050.000,00	0,00	95.923.428,00	95.923.428,00	
4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	0,00	0,00	4.942.485,00	4.942.485,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.968.492.689,00	0,00	3.968.492.689,00	3.968.492.689,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

trah:4 By Sa:0d

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBI
			a/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD/BLUD)	3.968.492.689,00	0,00	3.968.492.689,00	3.968.492.689,00	
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Daerah	3.968.492.689,00	0,00	3.968.492.689,00	3.968.492.689,00	
4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.312.696.816,00	0,00	3.312.696.816,00	3.312.696.816,00	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	3.000.000.000,00	0,00	2.280.926.460,00	2.280.926.460,00	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	3.000.000.000,00	0,00	2.280.926.460,00	2.280.926.460,00	
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	0,00	0,00	3.797.028,00	3.797.028,00	
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	250.000.000,00	0,00	464.985.807,00	464.985.807,00	
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	84.054.092,00	84.054.092,00	
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	59.241.109,00	59.241.109,00	
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	1.114.042,00	1.114.042,00	
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	0,00	48.827.527,00	48.827.527,00	
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	1.768.495,00	1.768.495,00	
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Bersih Tanah	0,00	0,00	56.770,00	56.770,00	
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	0,00	268.623.339,00	268.623.339,00	
4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah Lainnya	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	150.000.000,00	0,00	553.793.549,00	553.793.549,00	
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	150.000.000,00	0,00	553.793.549,00	553.793.549,00	
4.1.4.24	Pendapatan Tunggalan Pajak	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.24.11	Pendapatan Tunggalan Pajak Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	682.800.000,00	682.800.000,00	
4.3.11	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	682.800.000,00	682.800.000,00	
4.3.11.11	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	682.800.000,00	682.800.000,00	
4.3.11.11.01	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	682.800.000,00	682.800.000,00	
5	BELANJA	122.627.777.427,00	0,00	99.030.153.123,00	99.030.153.123,00	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	85.750.640.530,00	0,00	66.348.986.435,00	66.348.986.435,00	
5.1.1	Belanja Pegawai	85.750.640.530,00	0,00	66.348.986.435,00	66.348.986.435,00	
5.1.1.01	Gaji Pokok dan Tunjangan	7.315.738.389,00	0,00	4.848.147.897,00	4.848.147.897,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Umum Represenasi	5.794.191.659,00	0,00	3.640.275.250,00	3.640.275.250,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.521.546.730,00	0,00	1.197.871.647,00	1.197.871.647,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBI
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jilidasi	289.992.361,00	0,00	181.525.000,00	181.525.000,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsi Anal Umum	214.066.867,00	0,00	152.440.000,00	152.440.000,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Bonus	290.974.360,00	0,00	150.506.240,00	150.506.240,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.652.601,00	0,00	3.636.522,00	3.636.522,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	77.327,00	0,00	57.534,00	57.534,00
5.1.1.01.09	Jalan Aspal dan Kerduloran	1.811.496.174,00	0,00	117.411.496,00	117.411.496,00
5.1.1.01.11	Jaminan Kesehatan Kerja (JKK)	10.242.571,00	0,00	7.481.124,00	7.481.124,00
5.1.1.01.12	Jaminan Kesehatan (JKK)	81.121.496,00	0,00	42.443.496,00	42.443.496,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Pembebanan PNS	74.589.510.000,00	0,00	58.198.598.292,00	58.198.598.292,00
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.092.020.000,00	0,00	862.544.000,00	862.544.000,00
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	73.737.480.000,00	0,00	57.321.045.292,00	57.321.045.292,00
5.1.1.05	Inentif Peningkatan Pajak Daerah	3.225.413.425,00	0,00	3.424.711.746,00	3.424.711.746,00
5.1.1.05.01	Raja Peningkatan Pajak Daerah	3.555.413.425,00	0,00	3.424.711.746,00	3.424.711.746,00
5.1.1.06	Inentif Peringkat Retribusi Daerah	130.000.000,00	0,00	89.537.500,00	89.537.500,00
5.1.1.06.01	Inentif Peringkat Retribusi Daerah	130.000.000,00	0,00	89.537.500,00	89.537.500,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	37.057.136.797,00	0,00	32.681.166.688,00	32.681.166.688,00
5.2.1	Belanja Pegawai	15.511.325.500,00	0,00	14.482.867.832,00	14.482.867.832,00
5.2.1.01	Honorarium PNS	3.531.235.500,00	0,00	3.475.600.000,00	3.475.600.000,00
5.2.1.01.04	Honorarium Piket Jaga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.05	Honorarium Rinsidasi dan Peningkatan Rinsidasi	1.086.710.000,00	0,00	969.800.000,00	969.800.000,00
5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan Keuangan	2.521.435.500,00	0,00	2.472.200.000,00	2.472.200.000,00
5.2.1.01.12	Honorarium Pengelola Seta	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
5.2.1.01.15	Honorarium Tim Teknis	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	392.765.000,00	0,00	394.383.332,00	394.383.332,00
5.2.1.02.06	Honorarium Kepangkatan	45.015.000,00	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00
5.2.1.02.10	Honorarium Sengk	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
5.2.1.02.11	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.02.13	Honorarium Pengelolaan Keuangan	336.000.000,00	0,00	287.033.332,00	287.033.332,00
5.2.1.02.18	Honorarium Pengelola Seta	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
5.2.1.02.20	Honorarium Penyusunan Kegiatan	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5.2.1.03	Uang Lembat	1.117.121.000,00	0,00	1.116.410.000,00	1.116.410.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembat PNS	840.331.000,00	0,00	840.770.500,00	840.770.500,00
5.2.1.03.02	Uang Lembat Non PNS	266.790.000,00	0,00	252.700.000,00	252.700.000,00
5.2.1.07	Inentif Khusus Beban Kerja	8.003.050.000,00	0,00	7.155.764.000,00	7.155.764.000,00
5.2.1.07.01	Inentif Khusus Beban Kerja	8.003.050.000,00	0,00	7.155.764.000,00	7.155.764.000,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBI
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.1.08	Insentif Khusus Beban Kerja Non PNS	2.487.150.000,00	0,00	2.350.700.000,00	2.350.700.000,00	
5.2.1.08.01	Insentif Khusus Beban Kerja Non PNS	2.487.150.000,00	0,00	2.350.700.000,00	2.350.700.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.624.486.297,00	0,00	16.643.826.066,00	16.643.826.066,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	564.012.401,00	0,00	422.216.665,00	422.216.665,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	258.681.601,00	0,00	229.578.565,00	229.578.565,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	36.207.000,00	0,00	35.907.500,00	35.907.500,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materi Dan Benda Pos Lainnya	13.602.000,00	0,00	9.765.000,00	9.765.000,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.000.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai habis perlengkapan komputer	235.521.800,00	0,00	142.165.600,00	142.165.600,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	670.400.000,00	0,00	406.036.683,00	406.036.683,00	
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Kegiatan	15.000.000,00	0,00	7.402.234,00	7.402.234,00	
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Logam / Non Logam	40.000.000,00	0,00	2.287.000,00	2.287.000,00	
5.2.2.02.12	Belanja Piagam, Plak, Cendramata, Hadiah	376.500.000,00	0,00	213.759.250,00	213.759.250,00	
5.2.2.02.21	Belanja Bahan Cetakan	238.900.000,00	0,00	182.588.199,00	182.588.199,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.086.592.165,00	0,00	5.429.454.978,00	5.429.454.978,00	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	72.400.000,00	0,00	11.798.647,00	11.798.647,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	15.000.000,00	0,00	10.001.900,00	10.001.900,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	354.000.000,00	0,00	338.240.481,00	338.240.481,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	332.100.000,00	0,00	318.550.000,00	318.550.000,00	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	10.710.000,00	0,00	5.972.000,00	5.972.000,00	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Massa/Elektronik	50.000.000,00	0,00	49.920.000,00	49.920.000,00	
5.2.2.03.13	Belanja pembuatan spanduk, umbul-umbul, Bendera	50.000.000,00	0,00	30.739.500,00	30.739.500,00	
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Cleaning Service	95.000.000,00	0,00	94.993.450,00	94.993.450,00	
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Instruktur/Narasumber	255.000.000,00	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00	
5.2.2.03.18	Belanja Jasa Penyusunan Kegiatan	10.000.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
5.2.2.03.19	Belanja Operasional Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.22	Belanja Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan	4.337.837.000,00	0,00	4.057.700.000,00	4.057.700.000,00	
5.2.2.03.25	Belanja Jasa Petugas Koamenan	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Sistem Informasi Keuangan Daerah	72.545.165,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.28	Belanja Jasa Tim Pemeriksaan Eksternal	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.30	Belanja Jasa Upah Mandor/Tukang/Buruh	105.000.000,00	0,00	97.314.000,00	97.314.000,00	
5.2.2.03.31	Uang Pengganti Transport	75.000.000,00	0,00	25.425.000,00	25.425.000,00	
5.2.2.03.34	Belanja Jasa Pihak Ketiga	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	
5.2.2.03.38	Belanja Jasa Bantuan Hukum	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Prinsip 3 Simbol



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2685/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo

di,-

Gorontalo

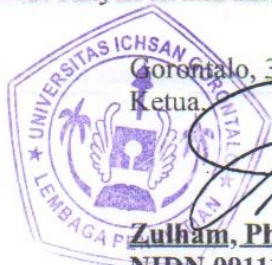
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Natasya Fabrilla Hikaya
NIM : E1117058
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : KANTOR BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO
Judul Penelitian : ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DI KANTOR
BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 30 November 2020

Ketua

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104



PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO
BADAN KEUANGAN

Jln. Nani Wartabone No.06 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur

SURAT KETERANGAN

Nomor : 970/ B.KEU/260 / 2021

Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NATASYA FABRILLA HIKAYA

NIM : E1117058

Jurusan : AKUNTANSI

Adalah benar-benar telah mengadakan penelitian dan memperoleh data dari Badan Keuangan Kota Gorontalo, berupa Sejarah Singkat Berdirinya Badan keuangan, Visi Misi, bagan Struktur Organisasi digunakan untuk kelengkapan Penyusunan Skripsi yang berjudul "ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PADA BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO". adapun data yang benar-benar real di dalam kegiatan Badan Keuangan Kota Gorontalo.

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 01 Maret 2021

Plt. Kepala BADAN KEUANGAN
KOTA GORONTALO



MURYANTO, S.P., M.Ec.Dev.CA

Pengelola Utama Muda

Nip. 196807061989031001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0022/UNISAN-G/S-BP/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : NATASYA FABRILLA HIKAYA
NIM : E1117058
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis kinerja keuangan pemerintah pada badan keuangan kota gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 24%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 08 Maret 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



BISMILLAH YA ALLAH E1117058 insya allah.docx

Mar 5, 2021

9150 words / 62762 characters

E.11.17.058

NATASYA FABRILLA HIKAYA.docx

Sources Overview

24%

OVERALL SIMILARITY

1	www.scribd.com	3%
	INTERNET	
2	eprints.perbanas.ac.id	3%
	INTERNET	
3	eprints.uny.ac.id	2%
	INTERNET	
4	eprints.iain-surakarta.ac.id	2%
	INTERNET	
5	id.scribd.com	1%
	INTERNET	
6	scholar.unand.ac.id	1%
	INTERNET	
7	ejournal.unsrat.ac.id	1%
	INTERNET	
8	digilib.uinsgd.ac.id	<1%
	INTERNET	
9	journal.feb.unmul.ac.id	<1%
	INTERNET	
10	repository.unib.ac.id	<1%
	INTERNET	
11	jurnal.ieuncen.ac.id	<1%
	INTERNET	
12	mafiadoc.com	<1%
	INTERNET	
13	docplayer.info	<1%
	INTERNET	
14	repository.unej.ac.id	<1%
	INTERNET	
15	media.neliti.com	<1%
	INTERNET	
16	es.scribd.com	<1%
	INTERNET	
17	repo.darmajaya.ac.id	<1%
	INTERNET	

18	docobook.com	INTERNET	<1%
19	helpmeups.files.wordpress.com	INTERNET	<1%
20	repository.uinsu.ac.id	INTERNET	<1%
21	www.slideshare.net	INTERNET	<1%
22	digilibadmin.unismuh.ac.id	INTERNET	<1%
23	eprints.ung.ac.id	INTERNET	<1%
24	simki.unpkediri.ac.id	INTERNET	<1%
25	journals.synthesispublication.org	INTERNET	<1%
26	digilib.unila.ac.id	INTERNET	<1%
27	niasbaratkab.go.id	INTERNET	<1%
28	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-16	SUBMITTED WORKS	<1%
29	Alma Meita Makausi, Harijanto Sabijono, Sherly Pinatik. "KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PEND...	CROSSREF	<1%
30	jdih.setjen.kemendagri.go.id	INTERNET	<1%
31	www.neliti.com	INTERNET	<1%
32	eprints.stainkudus.ac.id	INTERNET	<1%
33	eprints.ums.ac.id	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None

CURRICULUM VITAE

1. INFORMASI PRIBADI



Nama	: Natasya Fabrilla Hikaya
NIM	: E11.17.058
Tempat/Tanggal/Lahir	: Suwawa, 24 Juli 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Angkatan	: 2017
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Dumbayabulan, Kecamatan Suwawa Timur, Kab Bone Bolango

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2004-2005 TK DEWI SARTIKA
- 2005-2011 SDN 1 SUWAWA TIMUR
- 2011-2014 SMPN 1 SUWAWA TIMUR
- 2014-2017 SMAN 3 GORONTALO
- 2017-2021 UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO